

**SEJARAH DAN FUNGSI PASANGGRAHAN KOTANOPAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL 1930-2013**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Program Studi Sejarah
Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Disusun oleh :
Miftah Khoiriah (2211020071)**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN
ISLAM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
2026M/1448H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftah Khoiriah

Nim : 2211020071

Tempat/Tanggal Lahir : Kotanopan/03 Januari 2003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini berjudul **"Sejarah Dan Fungsi Pasanggrahan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal 1930-2013"** yang Insya Allah, benar-benar murni karya saya sendiri, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 31 Agustus 2026

Saya yang menyatakan,



Miftah Khoiriah

NIM. 2211020071

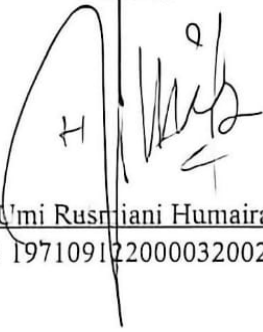
PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Skripsi dengan judul “Sejarah dan Fungsi Pasanggrahan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal 1930–2013,” ditulis oleh Miftah Khoiriah, NIM 2211020071, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, hari Rabu 09 September 2026 dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam.

Padang, 21 September 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Ketua


H. Umi Rusmiani Humairah, M. Pd.
NIP. 197109122000032002

Sekretaris


Dra. Yulniza, M. Ag.
NIP. 196906201994032004

Anggota

Penguji I


Dr. Siti Aisyah, M. Ag.
NIP. 197212202007012010

Penguji II


Dr. Asril S. Hum., MA
NIP. 197707112009121003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Taufiqurrahman, M. Ag., M.Hum
NIP. 197009151994031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Sejarah dan Fungsi Pasanggrahan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal 1930–2013”** yang di susun oleh saudari Miflah Khoiriah, NIM 2211020071 Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.

Padang, 01 september 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Sudarman, S.Hum. MA
197707162007101005

Pembimbing II



Dra. Yulnizah, M.Ag
196906201994032004

ABSTRAK

Miftah Khoiriah, 2211020071, Judul Skripsi “Sejarah dan Fungsi Pasanggrahan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal 1930–2013,” Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Penelitian ini membahas Sejarah dan Fungsi Pasanggrahan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal 1930–2013. Pasanggrahan Kotanopan merupakan salah satu bangunan peninggalan kolonial yang memiliki nilai sejarah dan berkaitan dengan perkembangan pemerintahan serta kehidupan masyarakat di Kotanopan. Bangunan ini didirikan pada tahun 1930 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai tempat persinggahan pejabat sekaligus pendukung kegiatan administrasi pemerintahan di wilayah pedalaman Mandailing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah berdirinya Pasanggrahan Kotanopan, menganalisis fungsi bangunan sepanjang tahun 1930–2013, serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perubahan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan memanfaatkan sumber arsip, dokumen, foto, serta wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah berdirinya Pasanggrahan Kotanopan dikarenakan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal merupakan wilayah yang memiliki jaringan dengan pemerintahan kolonial Belanda. Kondisi geografis wilayah Tapanuli yang sulit dijangkau serta mendorong pemerintah kolonial menyediakan fasilitas pendukung di wilayah pedalaman. Proses berdirinya berkaitan dengan penyediaan fasilitas untuk mendukung mobilitas pejabat, tamu pemerintah, dan kegiatan administrasi di Kotanopan. Bangunan yang memiliki ruang tamu, teras, 11 kamar tidur, kamar mandi, toilet, dan halaman luas menunjukkan bahwa sejak awal Pasanggrahan dirancang sebagai tempat persinggahan. Pasanggrahan Kotanopan mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan perubahan politik, sistem pemerintahan, dan kebutuhan masyarakat. Pada masa kolonial, Pasanggrahan berfungsi sebagai tempat persinggahan dan mendukung kegiatan pemerintahan. Pada masa pendudukan Jepang Sebagai Fasilitas Administrasi Pemerintahan Militer Jepang. Revolusi Kemerdekaan sampai masa Orde Lama, fungsinya kebutuhan pemerintahan dan perjuangan. Pada Orde Baru, Pasanggrahan dimanfaatkan sebagai wisma pemerintah. Masa Reformasi, berkembang menjadi fasilitas penginapan yang dapat digunakan masyarakat umum dan wisatawan. Perubahan fungsi tersebut dipengaruhi oleh kondisi fisik bangunan, tata ruang, lokasi, perubahan sistem pemerintahan, perkembangan sosial-ekonomi, serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pasanggrahan Kotanopan tidak hanya mengalami perubahan fungsi, tetapi juga tetap mempertahankan nilai sejarahnya sebagai bagian dari warisan sejarah dan identitas lokal masyarakat Kotanopan.

Kata Kunci : Sejarah. Pasanggrahan Kotanopan, Perubahan Fungsi

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat umur, kesehatan, kesabaran, pikiran, dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Sejarah Dan Fungsi Pasanggrahan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal 1930-2013”** Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga beliau selalu menjadi teladan yang memberi petunjuk dalam menjalani kehidupan dunia.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus terutama kepada :

1. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayah, Umak, Saudara-Saudara kandung penulis karena selalu mendoakan, memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang, dan semangat kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Pengorbanan keluarga menjadi alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada abang penulis yaitu Sulaiman Batubara terima kasih atas segala bantuan, terutama dalam memenuhi kebutuhan penulis selama perkuliahan. Penulis menyadari banyak pengorbanan yang telah abang lakukan, termasuk

mendahulukan Pendidikan penulis dibandingkan kepentingan pribadi abang sendiri. Semoga setelah salah satu tanggung jawab abang terhadap pendidikan penulis telah selesai, Allah segera mempertemukan abang dengan jodoh terbaik dan diberikan kehidupan yang bahagia.

2. Kepada Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd, selaku Rektor beserta jajaran terimakasih atas kebijakan, fasilitas, serta dukungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Dengan menyediakan suasana akademik yang kondusif bagi Mahasiswa/i dalam menuntut ilmu pengetahuan di lingkungan kampus.
3. Kepada Prof. Dr. H Taufikqurrahman M. Ag., M. Hum selaku Dekan Fakultas Adab dan Humanior beserta seluruh jajaran Fakultas Adab dan Humaniora, yang telah memberikan fasilitas, pelayanan, serta dukungan selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada Dr. Erasiah, S. Hum., MA selaku Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam Kepala dan Hj. Umi Rusmiani Humairah, M. Pd selaku Sekretaris Program Studi Sejarah Peradaban beserta Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di jurusan Sejarah Peradaban Islam yang telah membantu Dan memberikan pelayanan serta arahan kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan studi.
5. Kepada Hj Umi Rusmiani Humairah, S.Ag, M.Pd selaku dosen Pembimbing Akademik penulis, atas bimbingan dan arahan sejak awal penulis berkuliah

dan selalu memberikan respon yang cepat dan baik untuk memastikan penulis tidak kebingungan selama perkuliahan.

6. Kepada Prof. Dr, Sudarman, S.Hum, MA selaku Pembimbing I dan Dra. Yulnizah, M.Ag. Pembimbing II penulis, terima kasih kepada bapak dan ibu yang telah meluangkan waktu, tenaga di tengah kesibukan bapak dan ibu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab kepada penulis dari awal hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Kepada Kepala Pengelola, seluruh staf pengelola Pasanggrahan Kotanopan, Lurah di kelurahan Kotanopan, dan Tokoh Agama di kelurahan Kotanopan yang memberikan izin dan akses bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang pasanggrahan kotanopan. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, bantuan, keterbukaan, dan informasi yang telah diberikan selama proses penelitian.
8. Kepada teman-teman jurusan Sejarah Peradaban Islam Angkatan 2022 terutama teman teman SPI C yang telah memberikan pengalaman perkuliahan kepada penulis, bantuan, dukungan, dan kebersamaan bersama penulis selama perkuliahan.
9. Kepada Raudatul Husnah yang bukan hanya sekedar teman, tetapi juga menjadi saudara selama perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, cerita, tawa, dan segala kenangan hingga akhirnya sampai pada tahap ini. Terima kasih juga kepada keluarga Raudah khususnya Ama dan Apa telah menerima dengan hangat ketika penulis

berada jauh dari keluarga. Kebaikan dan ketulusan yang diberikan akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan perkuliahan penulis. Setelah perkuliahan ini selesai dan masing-masing kita menjalani kehidupan yang berbeda, semoga kita tetap menjaga komunikasi, dan hadir dalam setiap kesempatan. Semoga setiap langkah yang kita tempuh setelah ini membawa keberhasilan kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih baik bagi kita

10. Terakhir dan yang istimewa. Terima kasih dan sekaligus bangga kepada diri sendiri yaitu Miftah Khoiriah telah bertahan dan berjuang hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun dalam perjalanan ini pernah merasa lelah, ragu, dan ingin berhenti. Terima kasih telah mampu melewati setiap proses, tantangan, serta berbagai keadaan yang tidak selalu mudah. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap perjuangan yang dijalani dengan kesabaran dan ketekunan akhirnya akan menemukan titik hasilnya. Semoga perjuangan yang telah dilalui menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik, serta menjadi pengingat bahwa diri mampu bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Padang, 31 Agustus 2026



Miftah Khoiriah
2211020071

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN PENGUJI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penjelasan Judul	9
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II: SOSIAL HISTORIS KOTANOPAN DAN LANDASAN	
KONSEPTUAL PASANGGRAHAN.....	19
A. Sejarah dan Geografis Kotanopan	19
B. Konsep Pesanggrahan dalam Sistem Belanda	24
C. Kondisi Sosial Politik Hindia Belanda di Kotanopan	30
BAB III: PASANGGRAHAN KOTANOPAN (1930-2013)	35
A. Sejarah Pasanggrahan Kotanopan (1930).....	35
B. Fungsi Pasanggrahan Kotanopan Mulai Dari Masa Penjajahan – revormasi	43
C. Faktor yang Memengaruhi Perubahan Fungsi dan Makna	72
BAB IV: PENUTUP	76
A. Kesimpulan.	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bangunan pemerintahan dan fasilitas kolonial di Indonesia sangat berkaitan dengan proses perluasan kekuasaan Belanda. Di Sumatra, penguatan kontrol Belanda dilakukan melalui dominasi politik dan ekonomi, pembentukan wilayah administratif, dan pelibatan *elite lokal* dalam sistem pemerintahan kolonial¹. Bangunan kolonial tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan, pusat pelayanan administrasi, dan sarana untuk mengendalikan masyarakat setempat. Di Mandailing, pengalaman kolonial memiliki karakter khusus karena terjadi bersamaan dengan perubahan sosial, politik, keagamaan, dan identitas masyarakat.²

Wilayah Mandailing, pengalaman kolonial memiliki karakter khusus karena terjadi bersamaan dengan perubahan sosial, politik, keagamaan, dan identitas masyarakat. Intervensi Belanda menguat setelah Perang Padri, kemudian mengubah hubungan masyarakat Mandailing dengan kekuasaan

¹ Tomy Wijaya dan Fatimah Alauwiyah, "Transformasi Tata Kelola Marga Di Sumatera Selatan: Analisis Komparatif Era Kolonial Belanda Dan Republik Indonesia, 1825-1983" *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No 3 (2025), hal. 514-523

² Agus Kurniawan, "Konsep Pelestarian Bangunan Kolonial di Jalur Belanda Menuju Singaraja, Kota Warisan Budaya" *Prosiding Konferensi Internasional Warmadewa ke-1 tentang Sains, Teknologi dan Kemanusiaan*, Vol. 7, No.8 (2021)

kolonial serta mempengaruhi tata ruang sosial mereka³. Pada awal abad ke-20, masyarakat Mandailing menunjukkan respons aktif terhadap kolonialisme. Mereka terlibat dalam pendidikan modern, organisasi kemasyarakatan, dan aktivitas sosial-politik. Hal ini menunjukkan bahwa Mandailing bukan hanya wilayah yang didominasi secara sepihak oleh Belanda, tetapi merupakan ruang negosiasi, perlawanan, dan transformasi sosial⁴.

Salah satu peninggalan fisik yang menonjol namun belum banyak terungkap jejak sejarahnya yaitu bangunan “Pasanggrahan Kotanopan”. Dinamai “Pasanggrahan Kotanopan” didasarkan pada makna dan konteks kata dalam sejarah dan arsitektur tradisional Indonesia. Pasanggrahan berasal dari kata Jawa Kuna “*sanggraha*”⁵, yang berarti tempat untuk berkumpul atau beristirahat. Secara sederhana, pasanggrahan merupakan bangunan atau fasilitas yang digunakan untuk tempat istirahat atau singgah, biasanya digunakan keluarga kerajaan atau pejabat tinggi. Dalam sejarah, pasanggrahan biasanya berfungsi sebagai tempat istirahat sementara, tempat singgah sementara, atau penginapan resmi bagi bangsawan atau pejabat pemerintah pada masa kerajaan

³ Abdur-Razzaq Lubis, “Mandailing Islam across Borders” *Taiwan Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 2, No.2 (2005), hal. 55-98

⁴ Ja'far, “Menemukan Warisan Mandailing, Ulama: Pendidikan, Kaum Intelektual, dan Politik di Amerika Utara Sumatra pada Awal Abad ke-20” *Studi Islam yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Mataram*, Nomor. 2 (2022), hal. 296-336

⁵ Bahasa Jawa Kuna, adalah bentuk awal bahasa Jawa yang digunakan di Nusantara selama kerajaan Hindu- Buddha dari abad ke-8 hingga abad ke-15. Bahasa ini adalah bahasa sastra klasik yang digunakan dalam tulisan agama, sejarah, dan sastra pada masa itu. Bahasa Jawa Kuna, yang biasanya digunakan dalam karya sastra, kitab suci, prasasti, dan dokumen resmi kerajaan, berbeda dengan bahasa Jawa modern karena pemahaman, tata bahasa, dan strukturnya yang lebih kompleks. Selain itu, bahasa ini banyak dipengaruhi oleh bahasa Sansekerta. Bahasa Kawi dianggap sebagai bahasa luhur yang menggambarkan tradisi dan budaya intelektual orang Jawa kuno.” Putu Gede Budhi Danaswara dan Ni Diah Purnamawati, “ Transformasi Kakawin Bharata Yuddha ke Dalam Pertunjukan Wayang Kulit Parwa Lakon Jayadrata Antaka Dalang I Made Sidja,” *jurnal IPGB Danaswara*, (2022)

dan kolonial. Bangunan yang disebut Pasanggrahan biasanya berfungsi sebagai tempat resor atau vila yang nyaman untuk bersantai, jauh dari hiruk pikuk aktivitas administrasi kerajaan atau pemerintahan. Dari segi arsitektur, pasanggrahan dibangun dengan tata ruang dan keindahan yang mendukung tujuan tersebut, seringkali mengelilingi taman yang asri dan suasana tenang⁶.

Nama Pasanggrahan Kotanopan diberikan secara khusus karena Pasanggrahan, atau rumah singgah, merupakan salah satu infrastruktur vital yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bangunan ini dibangun sebagai tempat peristirahatan bagi para pejabat, kontrolir, atau asisten residen yang melakukan perjalanan dinas ke wilayah-wilayah pedalaman. Keberadaannya di Kotanopan menandakan posisi strategis wilayah ini dalam konstelasi⁷.

Administrasi dan ekonomi kolonial pada masanya. Gedung ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perjuangan kemerdekaan, sehingga namanya terkait erat dengan peristiwa sejarah lokal yang penting.⁸ Pasanggrahan Kotanopan berada di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pasanggrahan ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930 dan awalnya berfungsi sebagai tempat persinggahan pejabat Belanda yang

⁶ Ira Mentayani & Mansyur, *Pesanggrahan Mandiangin : Kajian Sejarah dan Arsitektur Bangunan Hindia Belanda di Bukit Besar Mandiangin* (Yogyakarta : Arti Bumi Intaran (Anggota IKAPI), 2020) ,hal. 3-4

⁷ Khusnul Khofifah Harahap, dkk, *Jas Merah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah)* (Yogyakarta : Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2020), hal. 12-13

⁸ M.L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hal. 72.

bekerja di daerah tersebut. Bangunan ini juga menjadi saksi penting dalam sejarah perjuangan Sumatera untuk kemerdekaan Indonesia⁹.

Masa revolusi kemerdekaan, bangunan ini mengalami perkembangan yang signifikan. Pasanggrahan Kotanopan pernah digunakan sebagai lokasi pertemuan penting yang melibatkan tokoh nasional, termasuk Presiden Soekarno datang ke Pasanggrahan Kotanopan dalam kegiatan yang berkaitan dengan perjuangan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa penting yang dikaitkan dengan bangunan ini adalah kunjungan Presiden Soekarno pada 16 Juni 1948¹⁰.

Diadakannya rapat di Pasanggrahan Kotanopan karena fasilitas Pasanggrahan yang dibangun luas cocok untuk pertemuan yang dihadiri oleh ratusan tokoh pejuang. Bangunan ini menjadi simbol penting dari warisan sejarah dan budaya Mandailing Natal. Ini menunjukkan bentuk arsitektur kolonial Belanda berhubungan dengan perubahan sosial dan politik di tingkat lokal dan nasional. Bangunan yang berarsitektur Kolonila ini masih bisa diamati dan tetap berdiri hingga hari ini yang dikelola oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara¹¹. Dengan fungsi Pasanggrahan Kotanopan yang berubah menunjukkan dinamika hubungan kekuasaan antara kolonialisme dan negara nasional. Struktur kolonial dinegosiasikan ulang dalam konteks identitas lokal Mandailing

⁹ Iskandar Hasibuan. "Perayaan Kemerdekaan di Mandailing Natal". mandailing Pos Online. <https://malintangpos.co.id/perayaan-kemerdekaan-di-mandailing-natal-1/> di akses 13 oktober 2025

¹⁰ Dinas Sejarah, Kodim II Bukit Barisan, *Sejarah perang kemerdekaan di Sumatera, 1945-1950 (Indonesia Angkatan Darat*. Komando Daerah Militer-II Bukit Barisan. Dinas Sejarah, 2007), hal.234

¹¹ Kota Nopan Jadi Pusat Pelaksanaan Hari Pahlawan di Mandailing Natal," <https://madinapos.com/2021/11/10/kota-nopan-jadi-pusat-pelaksanaan-hari-pahlawan-di-mandailing-natal/> (di akses, Rabu 4, februari 2026)

Natal. Bangunan ini menjadi aset penting Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilestarikan sebagai bagian dari identitas dan sejarah daerah Mandailing Natal¹².

Keterlibatan tenaga kerja atau tokoh lokal dalam pembangunan tersebut belum dapat dipastikan karena belum ditemukan sumber yang jelas. Tidak banyak dicatat tentang tokoh lokal yang ikut serta dalam pembangunan Pasanggrahan Kotanopan pada tahun 1930. Namun, diketahui bahwa pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda mengawasi beberapa pembangunan dan pengelolaan di wilayah Mandailing Natal, termasuk Kotanopan yaitu Pasanggrahan. Oleh karena itu, orang-orang lokal mungkin terlibat dalam proyek tersebut sebagai pejabat adat atau tokoh masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial untuk menyuksekannya.

Pasanggrahan Kotanopan masih dimanfaatkan sebagai tempat penginapan serta menjadi salah satu bangunan yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal hingga saat ini. Pemanfaatan tersebut antara lain terlihat dari penggunaan Pasanggrahan sebagai tempat menginap bagi peserta kegiatan yang berlangsung di wilayah tersebut. Depan Pasanggrahan juga terdapat Tugu Perintis Kemerdekaan yang memuat nama-nama tokoh pejuang Mandailing Natal. Keberadaan tugu tersebut turut memperkuat nilai

¹² Muhammad , *Sejarah Seni Rupa Sumatera Utara Kajian Kehidupan Seni Rupa Di Medan Tahun 1945-2005* (banda aceh : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2007), hal. 71

historis kawasan Pasanggrahan sebagai bagian dari sejarah perjuangan dan identitas daerah.

Pasanggrahan Kotanopan dalam perkembangan sejarah Mandailing Natal. Transformasi fungsi bangunan ini mencerminkan perubahan konteks sosial-politik serta cara masyarakat memaknai bangunan bersejarah sebagai bagian dari identitas kolektif dan memori sejarah lokal. Penelitian ini sangat penting untuk merekonstruksi sejarah berdirinya Pasanggrahan Kotanopan dan perubahan fungsinya dari tahun 1930 hingga 2013. Diharapkan bahwa penelitian ini tidak hanya memperkaya pengetahuan tentang sejarah lokal Mandailing Natal, tetapi juga meningkatkan pemahaman kita tentang bangunan bisa berubah dalam konteks sosial dan politik Indonesia¹³.

Selama bertahun-tahun, penelitian tentang pasanggrahan di Indonesia telah banyak dilakukan, termasuk penelitian tentang Pasanggrahan Mandiangan dan bangunan kolonial lainnya. Namun, penelitian khusus tentang Pasanggrahan Kotanopan masih sangat terbatas dan belum mempelajarinya secara menyeluruh dari perspektif sejarah, fungsinya, dan ingatan masyarakatnya. Akibatnya, penelitian ini sangat penting untuk mengisi celah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri kembali informasi yang hilang ataupun mulai redup dikalangan masyarakat yang akan digabungkan menjadi cerita sejarah yang lengkap.

¹³ nanang setiawan. "Ruang Tanpa Batas: Sejarah Dan Politik Memori Pada Public Space Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949". *Magister Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada*. hal. 186

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana sejarah berdirinya Pasanggrahan Kotanopan pada masa kolonial Hindia Belanda ?
- b. Bagaimana fungsi Pasanggrahan Kotanopan mulai dari masa Penjajahan - Revormasi ?
- c. Apa saja faktor yang mempengaruhi fungsi pasanggrahan Kotanopan ?

Supaya pembahasan tidak mengambang dari batasan masalah, maka penulis membatasi ini sebagai berikut:

a. Batasan temporal

Penelitian ini difokuskan dari tahun 1930 dipilih sebagai batas awal penelitian karena merupakan tahun pembangunan asanggrahan Kotanopan. Hingga perkembangannya Pada tahun 2013, bangunan ini mulai digunakan sebagai penginapan dibuka untuk umum, yaitu merupakan tahun batasan penulis melakukan penelitian. Kurun waktu ini dipilih untuk memfokuskan penelitian pada jejak sejarah pasanggrahan kotanopan di mandailing natal.

b. Batasan spasial

Batasan spasial adalah batasan yang didasarkan pada kesatuan wilayah geografis atau tempat penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada bangunan Pasanggrahan Kotanopan yang terletak di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

c. Batasan Tematis

Penelitian ini dibatasi secara ketat pada tinjauan sejarah. Fokusnya adalah pada sejarah peristiwa, dan Perkembangan Pasanggrahan setiap periode yang terjadi di Indonesia.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan sejarah berdirinya Pasanggrahan Kotanopan pada masa kolonial Hindia Belanda
- b. Menganalisis fungsi Pasanggrahan Kotanopan mulai dari masa Penjajahan - Revormasi
- c. Mendeskripsikan faktor faktor yang mempengaruhi fungsi Pasanggrahan Kotanopan

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengungkap sejarah berdirinya Pasanggrahan Kotanopan pada masa kolonial Hindia Belanda
- b. Untuk mengetahui fungsi-fungsi Pasanggrahan Kotanopan mulai dari masa Penjajahan - Revormasi

- c. Mengungkap faktor apa saja yang mempengaruhi fungsi Pasanggrahan Kotanopan

D. Penjelasan Judul

Judul “Sejarah dan Fungsi Pasanggrahan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal 1930–2013” dipilih untuk mengkaji keberadaan dan perkembangan fungsi Pasanggrahan Kotanopan sebagai salah satu bangunan yang memiliki nilai sejarah di wilayah Mandailing. Penelitian ini tidak hanya membahas Pasanggrahan sebagai peninggalan masa kolonial, tetapi juga menelusuri perubahan fungsi bangunan dalam berbagai periode sejarah Indonesia hingga tahun 2013. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian yang mencakup latar belakang pendirian, fungsi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi Pasanggrahan Kotanopan¹⁴.

“Sejarah” dalam penelitian ini merujuk pada kajian mengenai latar belakang dan proses berdirinya Pasanggrahan Kotanopan pada tahun 1930 serta perkembangannya dalam konteks periode sejarah Indonesia. Tahun 1930 dipilih sebagai batas awal penelitian karena merupakan tahun berdirinya Pasanggrahan Kotanopan. Sejak didirikan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, bangunan ini mengalami berbagai

¹⁴ Yulia Nurliani Lukito dan Amalia Nurul Rizky, ” Menggali masa lalu kota melalui pelestarian bangunan bersejarah” *Menggali masa lalu kota melalui pelestarian bangunan bersejarah*, Vol. 1, No. 1 (2017), hal. 1-8

perubahan sesuai kondisi politik, pemerintahan, dan sosial masyarakat pada setiap periode¹⁵.

Istilah “Fungsi” mengacu pada bentuk pemanfaatan Pasanggrahan Kotanopan sejak didirikan hingga tahun 2013. Pada awalnya, Pasanggrahan digunakan sebagai tempat persinggahan pejabat kolonial dalam perjalanan dinas. Dalam perkembangannya, fungsi tersebut mengalami perubahan mengikuti kebutuhan pemerintahan dan masyarakat pada setiap periode. Hingga tahun 2013, Pasanggrahan mulai dimanfaatkan sebagai penginapan yang digunakan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis dinamika fungsi Pasanggrahan serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi.

“Pasanggrahan Kotanopan” merupakan objek utama dalam penelitian ini, bangunan pasanggrahan yang berada di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Secara historis, Kotanopan merupakan bagian wilayah Tapanuli Selatan pada masa Kolonial Hindia Belanda. Letaknya yang berada dalam jalur pergerakan pemerintahan dan ekonomi pada masa Belanda menjadikan Pasanggrahan memiliki peranan dalam menunjang aktivitas perjalanan dan pemerintahan pada masanya¹⁶.

¹⁵Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1974)

¹⁶ Yusni Khairul Amri, *kearifan lokal Adat Istiadat Tapanuli Selatan* (Jawa Timur : Kun Fayakun Anggota Ikapi, 2018), hal. 3

Adapun rentang waktu “1930–2013” merupakan batas temporal penelitian. Tahun 1930 dipilih sebagai titik awal karena menandai berdirinya Pasanggrahan Kotanopan masa Kolonial Hindia Belanda. Sementara itu, tahun 2013 dijadikan batas akhir karena pada periode tersebut Pasanggrahan mulai dimanfaatkan sebagai penginapan yang terbuka untuk masyarakat umum. Rentang waktu tersebut perubahan fungsi Pasanggrahan secara dari masa kolonial hingga masa otonomi daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kedudukan Pasanggrahan Kotanopan sebagai bangunan bersejarah sekaligus sebagai bangunan yang mengalami perubahan pemanfaatan sesuai dengan perkembangan zaman.

“Sejarah dan Fungsi Pasanggrahan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal 1930–2013” menjelaskan kajian mengenai perjalanan historis Pasanggrahan Kotanopan sejak didirikan pada tahun 1930 hingga tahun 2013 serta perubahan fungsi yang terjadi dalam rentang waktu tersebut. Penelitian ini tidak hanya membahas Pasanggrahan sebagai bangunan peninggalan masa kolonial, tetapi juga menelusuri latar belakang pendiriannya, perkembangan fungsi pada berbagai periode pemerintahan, serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan fungsi tersebut. Dengan demikian, Pasanggrahan Kotanopan merupakan bangunan bersejarah yang keberadaannya mengalami perubahan fungsi seiring dengan perubahan politik, pemerintahan, dan kebutuhan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan pasanggrahan di antaranya dijelaskan oleh Ira dan Mansyur pada bukunya *“Pesanggrahan Mandiingin : Kajian Sejarah dan Arsitektur Bangunan Hindia Belanda di Bukit Besar Mandiingin”* bahwasanya dalam sejarah, pasanggrahan biasanya berfungsi sebagai tempat istirahat sementara, tempat singgah sementara, atau penginapan resmi bagi bangsawan atau pejabat pemerintah pada masa kerajaan dan kolonial. Bangunan yang disebut pasanggrahan biasanya berfungsi sebagai tempat resor atau vila yang nyaman untuk bersantai, jauh dari hiruk pikuk aktivitas administrasi kerajaan atau pemerintahan. Dari segi arsitektur, pasanggrahan dibangun dengan tata ruang dan keindahan yang mendukung tujuan tersebut, seringkali mengelilingi taman yang asri dan suasana tenang¹⁷.

Khusnul Khofifah Harahap, dkk, menuliskan dalam artikelnya yang berjudul *“Jas Merah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah)”* menjelaskan bahwa nama “Pasanggrahan” diberikan secara khusus karena merupakan salah satu infrastruktur vital yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bangunan ini dibangun sebagai tempat peristirahatan bagi para pejabat, kontrolir, atau asisten residen yang melakukan perjalanan dinas ke wilayah-wilayah pedalaman.

¹⁷ Mentayani dan Mansyur, *op.cit.* , hal. 3-4

Keberadaannya di Kotanopan menandakan posisi strategis wilayah ini dalam konstelasi administrasi dan ekonomi kolonial pada masanya.

Soekmono dalam artikelnya yang berjudul "*Dimensi Teknik Arsitektur*" yaitu mengenai perkembangan wilayah Sumatera pada masa kolonial menjelaskan bagaimana ekspansi administrasi Belanda menjangkau wilayah pedalaman dan membangun infrastruktur pendukung pemerintahan. Hal ini relevan untuk memahami posisi Kotanopan dalam jaringan administrasi kolonial di Tapanuli Bagian Selatan. Selain itu, penelitian mengenai bangunan kolonial di luar Jawa menunjukkan bahwa banyak bangunan yang mengalami perubahan fungsi setelah kemerdekaan sebagai bagian dari adaptasi terhadap kebutuhan pemerintahan daerah .¹⁸

Yulianto Sumalyo pada bukunya yang berjudul "*Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia*" membahas tentang Pasanggarahan Kotanopan telah berubah yang fungsi awalnya sebagai tempat peristirahatan pejabat kolonial Belanda menjadi situs bersejarah, tempat wisata budaya, dan pusat pelestarian nilai perjuangan kemerdekaan di Kabupaten Mandailing Natal setelah kemerdekaan. Bangunan ini menjadi simbol penting dari perjuangan nasional setelah kemerdekaan, terutama karena pernah menjadi tempat pertemuan besar Presiden Soekarno pada 16 Juni 1948, yang bertujuan

¹⁸Soekmono, " Dimensi Teknik Arsitektur" *Institut Teknologi Bandung* Vol. 42 No.1 (2014)

untuk mempersatukan rakyat Sumatera yang menghadapi ancaman pembebasan diri¹⁹.

Namun, penelitian yang secara khusus membahas tentang sejarah dan perkembangan fungsi Pasanggrahan Kotanopan masih sangat terbatas. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitik beratkan pada sejarah dan arsitektur pasanggrahan secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji sejarah berdirinya serta dinamika fungsi Pasanggrahan Kotanopan dari tahun 1930 hingga 2013. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hasil penelitian di atas. Oleh karena itu, penelitian ini berfungsi sebagai studi sejarah lokal. Tujuannya adalah untuk merekonstruksi berdirinya Pasanggrahan Kotanopan dan melihat bagaimana bangunan ini berkembang dan berfungsi dari masa kolonial hingga tahun 2013. Menggunakan sumber primer dan sekunder yang tersedia.

F. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan langkah langkahnya sebagai berikut :

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *heuriskein* , yang berarti menemukan atau memperoleh. Dalam konteks metode penelitian, heuristik merupakan keterampilan, teknik, dan proses sistematis untuk

¹⁹ Yulianto Sumalyo, *Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjha Mada Ekspres, 2017), hal. 89

mencari, mengumpulkan, serta menghimpun sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik, permasalahan dalam penelitian²⁰. Seperti yang dinyatakan Kuntowijoyo bahwa heuristik merupakan tahap pertama dalam penelitian sejarah yang menuntut daya kritis peneliti untuk menemukan jejak-jejak sejarah baik di lembaga arsip, perpustakaan, maupun melalui pelaku atau saksi sejarah²¹.

Sejalan dengan itu, Renier mendeskripsikan heuristik sebagai seni pencarian bukti sejarah, di mana peneliti berperan layaknya seorang detektif yang melacak berbagai petunjuk, baik tertulis maupun tidak tertulis, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan historiografis²². Dengan demikian Tahapan ini sangat penting karena bergantung pada ketersediaan jejak-jejak masa lalu. Tanpa sumber sejarah yang berhasil ditemukan, rekonstruksi peristiwa masa lalu tidak dapat dilakukan secara ilmiah .

Penulis membagi proses pencarian dan penemuan sumber menjadi dua tahap, yaitu mengumpulkan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu berupa Arsip kolonial seperti *Memorie van Overgave*, dokumen sezaman, foto-foto tua dan catatan perjalanan. Bagian terpenting dari heuristik ini adalah sejarah lisan melalui wawancara mendalam dengan saksi mata, tokoh masyarakat, sejarawan

²⁰Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto* (Jakarta: UI Press, 1986), hal.35

²¹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2005), hal. 89-93.

²² G.J. Renier, *Metode Sejarah, terjemahan Muin Umar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 112.

lokal, dan keluarga yang memiliki ikatan historis dengan pasanggarahan. Sumber sekunder dikutip dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan sejarah Mandailing Natal, sejarah kolonialisme di Sumatera, dan tipologi bangunan pasanggarahan²³.

2. Kritik Sumber

Setelah sumber-sumber dikumpulkan, proses pemilihan dilakukan untuk membedakan yang dapat digunakan dan yang tidak dapat digunakan. Tujuan dari proses pemilihan ini adalah untuk membedakan mana yang dapat digunakan dan mana yang tidak dapat digunakan sebagai subjek penelitian. Setelah melakukan kritik eksternal dan internal, kelayakan sumber untuk digunakan sebagai referensi dapat diputuskan.

- a. Kritik Eksternal : Kritik eksternal adalah usaha mendapatkan otensitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Kritik eksternal ini mengarah kepada pengujian terhadap suatu sumber. Kritik eksternal terjadi pada waktu menentukan siapa saja orang yang pas untuk di wawancara pada saat mengumpulkan sumber.
- b. Kritik Internal : Kritik interen digunakan untuk menguji kredibilitas sumber, yang berarti apakah sumber tersebut dapat

²³ Tversky & Kahneman (1974).” Penilaian dalam Ketidak pastian” *Heuristik dan Bias. Sains*, Vol.185 Nol. 4157 (1974), hal. 1124-1131.

digunakan sebagai dasar penulisan. Sumber yang dianggap kredibel jika keterangannya diakui oleh lebih dari satu sumber. Penulis melakukan kritikan terhadap informasi yang dikumpulkan untuk menentukan apakah benar keasliannya atau tidak.

3. Interpretasi

Tahap menganalisis dan menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah terverifikasi. Pada langkah ini imajinasi dan interpretasi mempunyai peranan yang sangat diperlukan karena membantu dalam melakukan analisis secara mendalam terhadap permasalahan yang di hadapi. Pada tahap ini, peneliti merangkai jejak sejarah yang terpisah menjadi satu kesatuan arasi yang logis dan bermakna untuk menjawab rumusan masalah

4. Historiografi

Tahap akhir berupa penyajian hasil penelitian dalam bentuk tulisan karya ilmiah (skripsi). penulisan kisah sejarah yang berdasarkan pada fakta-fakta yang telah di berikan penafsirannya. Penulisannya yang dilakukan secara naratif-kronologis dan analitis, menceritakan sejarah pasanggarahan dari masa ke masa sampai beralih fungsi. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga mudah di pahami dan di mengerti oleh khalayak banyak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan laporan ini nantinya, penulis membuat sistematika penyajian yang terdiri dari empat bab

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulis.

BAB II : Menjelaskan sosial historis kotanopan, landasan konseptual Pasanggrahan kolonial, dan sosial politik Hindia Belanda di kotanopan

BAB III: Menganalisis sejarah Pembangunan dan fungsi Pasanggrahan Kotanopan sejak masa pendudukan kolonial Belanda hingga tahun 2013 serta faktor-faktor yang memengaruhinya

BAB IV : Merupakan bagian penutup yang mana pada bagian ini berisikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

SOSIAL HISTORIS KOTANOPAN DAN LANDASAN KONSEPTUAL PASANGGRAHAN KOTANOPAN

A. Sejarah dan Geografis Kotanopan



Gambar 2.1 : Peta Tapaluni pada tahun 1919
(Sumber : <http://hdl.handle.net/1887.1/item:816213>)

Kotanopan terletak pada *lanskap* cekungan atau lembah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 300–500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini dikelilingi oleh perbukitan bergelombang hingga lereng curam yang merupakan bagian dari jajaran Pegunungan Bukit Barisan. Di sebelah utara dan barat daya, kondisi bentang alam Kotanopan sangat dipengaruhi oleh kawasan vulkanis Pegunungan Sorik Marapi serta perbukitan terjal Ulu Pungkut. *Konfigurasi* tersebut membentuk karakter wilayah yang berbukit dan relatif tertutup, tetapi tetap memiliki lembah yang mendukung perkembangan permukiman serta kegiatan pertanian. Kotanopan membelah oleh Batang

Gadis, sungai terbesar di Mandailing, serta anak sungainya, yaitu Batang Pungkut. Pada dekade 1930-an, kedua sungai tersebut memiliki peran penting dalam membentuk dan mendukung kehidupan masyarakat¹.

Aliran sungai membawa endapan yang menyuburkan tanah di dataran lembah sehingga mendukung kegiatan persawahan. Selain itu, sungai tersebut juga berfungsi sebagai sumber irigasi alami bagi lahan pertanian dan sebagai saluran bagi kawasan permukiman. Kotanopan berada di kawasan dataran tinggi dengan iklim tropis basah, yang ditandai oleh curah hujan rata-rata tinggi dan suhu udara relatif sejuk, berkisar antara 20°C-28°C. Kombinasi iklim basah dengan jenis tanah *andosol* dan *aluvial* yang kaya hara, terbentuk dari endapan vulkanis purba, menjadikan wilayah ini sangat ideal bagi pertumbuhan vegetasi yang lebat, kesuburan lahan pertanian, serta budidaya berbagai tanaman komoditas².

Kotanopan pada masa kolonial tidak dapat dipandang sebagai wilayah pasif yang hanya menerima pengaruh dari luar. Kajian mengenai kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa masyarakat lokal berperan aktif dalam jaringan ekonomi dan politik yang lebih luas, bukan sekadar menjadi objek pengaruh kolonial. Dalam konteks Mandailing, perkembangan sosial dan keagamaan pada awal abad ke-20 memperlihatkan munculnya pusat-pusat pendidikan serta aktivitas masyarakat lokal di tengah kekuasaan kolonial. Salah satu contohnya adalah berdirinya Madrasah Subulussalam di Sayur Maincat, Kotanopan, pada tahun 1929, yang menandakan

¹Topografische Inrichting Batavia. (1930-1938). *Topografische Kaart van Sumatra (Residentie Tapanoeli, Blad Kotanopan/Mandheling)*.

²Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. (1935) *Volkstelling 1930, Deel IV: Inheemse Bevolking van Sumatra*. Batavia: Landsdrukkerij.

adanya kehidupan sosial dan intelektual yang berkembang di wilayah tersebut menjelang tahun 1930³.

Iklim tropis sejuk mendukung perkebunan, sementara posisi di jalur perdagangan memperkuat peran administrative ekonomi. Peta kolonial menunjukkan Kotanopan sebagai titik transit pejabat Belanda dari Padangsidempuan ke Tapanuli. Mayoritas penduduk Kotanopan adalah Mandailing ataupun Batak Mandailing, dengan sistem yang berupa marga dan adat Dalihan Na Tolu. Sejak dipengaruhi oleh Kerajaan Mandailing pada abad ketiga belas dan keempat belas, masyarakat di wilayah ini mulai beragama Islam. Populasi bergantung pada Sungai Batang Gadis untuk “lubuk larangan” merupakan pengelolaan ikan musiman dan bertani subsisten berupa sayur dan padi. Setelah kolonialisme mengubah struktur, kopi ditanam paksa hingga 1908, dan perkebunan karet menjadi komoditas ekspor utama pada awal 1900-an, dengan Kotanopan menjadi salah satu wilayah utama di Tapanuli Selatan untuk ekspor.⁴

Masyarakat Mandailing tidak diam dengan perubahan tersebut. Kehidupan sehari-hari masih bergantung pada struktur adat, peran raja-raja lokal, dan jaringan sosial berbasis marga. Oleh karena itu, pemerintahan kolonial harus bernegosiasi dengan otoritas lokal, terutama dalam hal ketertiban dan mobilitas tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa modernisasi kolonial Mandailing selalu berhadapan dengan tradisi sosial yang telah lama mapan dan tidak pernah masuk dalam ruang kosong. Seperti struktur sosial Mandailing sistem kekerabatan dan kepemilikan tanah adat masih kuat yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Mandailing.

³ Yulia Nurliani dkk, “Menelusuri kembali warisan benteng di Ternate, Maluku Utara: nostalgia, pariwisata, dan keterlibatan masyarakat” *Warisan yang Dibangun*, vol. 9

⁴ Cut Nuraini, “Variasi Pola Desa-Desa Tradisional Di Kotanopan, Mandailing Natal,” *Nalar* Vol.9,No.1 (2010}, hal. 11-26

Kepemilikan tanah sebagai sarana penting dalam penanaman karet di wilayah ini menekankan pada aspek marga, dimana tiap marga menguasai tanah-tanah tertentu yang nantinya dijadikan sebagai lahan untuk tanaman mereka. Kepemilikan tanah diwilayah Tapanoeli secara umum pada awalnya di miliki oleh pemerintah kolonial Belanda dan masyarakat hanya mendapat hak penggunaan atas tanah-tanah tersebut, masyarakat bisa menggunakan tanah-tanah tersebut sesuai dengan kemampuan, karena mereka sudah mengerjakan lahan tersebut masyarakat mendapatkan hak kepemilikan atas tanah tersebut dan dapat diwariskan secara turun-temurun⁵.

Raja-raja adat yang ada diwilayah tersebut diberikan haknya untuk mengelola tanah dengan semakin banyaknya rakyat dan raja serta masyarakat lokal yang menggunakan lahan tersebut untuk penanaman karet menjadikan penanaman karet diwilayah Kotanopan dan wilayah Tapanuli secara umum lebih di dominasi perkebunan rakyat dibandingkan perkebunan swasta atau *Ondernemingonderneming* milik pengusaha eropa. Keberadaan Pasanggrahan Kotanopan menandakan bahwa wilayah ini memiliki peran administratif penting dalam pemerintahan kolonial. Pasanggrahan digunakan sebagai tempat tinggal bagi pejabat kolonial seperti kontrolir, yang mengelola wilayah Mandailing. Bangunan ini didirikan sebagai bagian dari rencana pemerintah kolonial untuk memperkuat otoritas administratif di wilayah pedalaman⁶.

Perkebunan karet Pasar Kotanopan juga berfungsi sebagai pusat perdagangan untuk menghubungkan Padangsidempuan dan pelabuhan Teluk Bayur Padang, menghasilkan pendapatan negara. Penulangan emas Sungai Batang Gadis meningkatkan pendapatan masyarakat. Jalan Lintas Medan-PadangSumatera yang

⁵ Dendy Reza Juliansyah Siregar dan Pujiati, "Mengguris Karet, Budaya Penopang Hidup Masyarakat Kotanopan," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol.4, No.5, (2025), hal. 1-8

⁶Lance Castles, *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera: Tapanuli 1915-1940*. (Kepustakaan Populer Gramedia, 2001), hal . 7

membantu distribusi hasil perkebunan dan perikanan lokal. Kotanopan Tidak ada terdapat rel kereta api, di masa kolonial transportasi transportasinya bergantung pada andalusit ataupun kereta kuda dan becak andong. Untuk lokal sungai Batang Gadis untuk rakit kayu/pasir. Pasanggrahan yang ada pada 1930 memperluas fasilitas peristirahatan dan meningkatkan mobilitas *administrative*⁷.

Kotanopan tidak dapat dipahami hanya sebagai lokasi geografis biasa, melainkan sebagai ruang strategis yang terbentuk melalui interaksi antara kondisi alam dan kepentingan kolonial. Secara geografis, Kotanopan berada di jalur penting yang menghubungkan pusat administrasi kolonial, permukiman masyarakat lokal, dan kawasan pegunungan Mandailing. Posisi ini menjadikannya bagian dari wilayah pedalaman yang memiliki nilai strategis dalam mobilitas, perdagangan, dan pengawasan wilayah⁸.

Pembentukan wilayah administratif kolonial di Sumatra tidak ditentukan semata-mata oleh batas alam, tetapi juga dipengaruhi oleh topografi wilayah, kondisi sosial dan budaya masyarakat, kepentingan ekonomi, strategi politik kolonial. Dengan demikian, sejarah geografis Kotanopan harus dipahami sebagai hasil dari pertemuan antara medan pegunungan yang membentuk akses dan pola hunian dengan kepentingan kolonial yang berupaya mengatur ruang, penduduk, serta jalur mobilitas di Mandailing.

⁷ *Ibid.*, hal 10

⁸Syaifullah Anwar “Deli dan Sumatera Timur dalam Pusaran Politik Kawasan Kolonial Belanda” *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol 6. No 2 , hal.

B. Konsep Pasanggrahan dalam Sistem Belanda

Pesanggrahan yang dalam beberapa dokumen juga ditulis “pasanggrahan” berakar kuat dalam tradisi linguistik Nusantara dan diserap dari bahasa Jawa Kuno, yaitu sanggraha. Dalam kamus bahasa Jawa Kuno, kata sanggraha berarti tindakan menyambut, mengumpulkan, menampung, menyajikan makanan, atau menyediakan tempat beristirahat bagi tamu terhormat. Dengan demikian, pasanggrahan pada dasarnya merujuk pada tempat yang disediakan untuk menerima dan menjamu tamu, terutama tamu penting atau terhormat. Dalam konteks kosmologi politik kerajaan-kerajaan tradisional di Jawa, pasanggrahan merujuk pada kompleks bangunan yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan atau persinggahan sementara di luar pusat kekuasaan, yaitu keraton. Kompleks ini biasanya digunakan oleh raja, keluarga kerajaan, atau pejabat tinggi untuk beristirahat dari kesibukan pemerintahan, melakukan kontemplasi spiritual, berburu, serta menerima dan menyambut utusan asing sebelum mereka diizinkan memasuki ibu kota kerajaan⁹.

Pasanggrahan tradisional umumnya dirancang dengan memadukan keindahan alam, seperti taman air atau taman sari, lanskap pegunungan, serta suasana yang mendukung ketenangan spiritual. Oleh karena itu, makna awal pasanggrahan tidak dapat dipisahkan dari dua fungsi utama, yaitu sebagai tempat rekreasi estetis dan sebagai ruang sakral-spiritual yang berkaitan dengan kewibawaan penguasa tradisional. Namun, seiring masuk dan menguatnya kekuasaan kolonial Barat di Indonesia mulai dari era *Vereenigde Oostindische Compagnie* atau VOC hingga terbentuknya pemerintahan formal Hindia Belanda makna sosiologis dan fungsi pasanggrahan

⁹ Lihat kajian mengenai peran peristirahatan keraton dalam naskah dinas kebudayaan: “*Pesanggrahan Dalem Ngeksigondo Kaliurang: Sejarah, Arsitektur, dan Fungsinya Dulu hingga Kini*,” (Yogyakarta : Balai Pelestarian Cagar Budaya , 2020), hal. 02

mengalami perubahan serta pendefinisian ulang secara mendasar. Pemerintah kolonial memerlukan istilah lokal yang dapat dipahami masyarakat pribumi untuk menyebut fasilitas penginapan resmi milik pemerintah. Oleh karena itu, istilah pasanggrahan diadopsi secara resmi dari istilah Belanda *logement* atau *herberg*¹⁰.

Sistem kolonial, fungsi utama pasanggrahan adalah mendukung mobilitas birokrasi sebagai pos logistik dan tempat transit administratif. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, keterbatasan infrastruktur transportasi darat serta kondisi geografis pedalaman Sumatra yang berbukit-bukit mengharuskan pejabat kolonial seperti *controleur*, *asisten residen*, *gezaghebber*, dan petugas dinas kesehatan *gouvernementsarts* menempuh perjalanan selama sehari-hari untuk menginspeksi wilayah kekuasaannya. Pasanggrahan kemudian dibangun di titik-titik strategis sepanjang jalur transit utama. Bangunan ini menyediakan tempat istirahat yang layak bagi para birokrat Eropa, sekaligus berfungsi sebagai fasilitas pendukung perjalanan. Pada masa awal, fasilitas tersebut mencakup penyediaan pakan kuda. Seiring diperkenalkannya kendaraan bermotor, pasanggrahan juga dilengkapi dengan bengkel ringan dan persediaan bahan bakar¹¹.

Fungsi Pasanggrahan berkaitan erat dengan penataan ruang kolonial. Kota-kota Kolonial umumnya dibangun sebagai pusat administrasi dan perdagangan yang terbagi atas zona inti, zona penyangga, dan permukiman lokal di pinggiran. Di pedalaman, seperti Kotanopan yang kaya akan karet dan kopi, Pasanggrahan berfungsi sebagai titik pengawasan kolonial. Bangunan ini memudahkan Controleur untuk mengawasi arus modal, tenaga kerja, dan hasil bumi, memantau pemungutan pajak atau belasting,

¹⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1974), hal. 89

¹¹ Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid dan Marjoko Santoso, “Transition In Building Function Of The Former Official Residences For Resident And Resident Assistants From The Dutch Colonial Heritage Of The 19-20 Thcentury In Madiun Raya” *Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, vol. 7 No. 1 (2023), hal. 82-90

mengerahkan tenaga kerja wajib melalui *heerendiensten* atau kerja rodi, menjalankan pengawasan tanpa harus membangun kantor permanen besar di setiap desa¹².

Fungsinya sebagai pusat pengawasan administratif dan ekonomi, Pasanggrahan juga menjadi tempat negosiasi sosial-politik dalam kerangka *indirect rule* atau pemerintahan tidak langsung. Pemerintah Belanda mengandalkan loyalitas elite tradisional pribumi, seperti kepala kuria, raja adat, dan kepala kampung, untuk mengendalikan wilayah pedalaman. Dalam konteks tersebut, Pasanggrahan berfungsi sebagai ruang pertemuan formal dan tempat pejabat kolonial memanggil elite lokal, Media penyampaian instruksi, kebijakan, dan tuntutan administratif kolonial, tempat negosiasi, terutama terkait pajak, tenaga kerja, keamanan, serta pengelolaan hasil bumi. Sarana integrasi elite lokal ke dalam hierarki birokrasi kolonial. Beranda Pasanggrahan memiliki makna simbolis yang penting. Di satu sisi, ruang tersebut memungkinkan interaksi dan kerja sama antara pejabat kolonial dan elite pribumi. Namun, di sisi lain, pengaturan ruang, tata cara pertemuan, dan posisi duduk dapat menegaskan hierarki kekuasaan serta batas demarkasi antara penjajah dan pihak yang dijajah. Dengan demikian, Pasanggrahan merupakan ruang administratif sekaligus arena produksi dan peneguhan kekuasaan kolonial.

Pasanggrahan pada masa kolonial akhir juga berperan sebagai akomodasi perjalanan dan mulai berkembang ke arah layanan wisata. Di wilayah Priangan, Pasanggrahan dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda bersama pemerintah lokal sebagai tempat penginapan bagi para pelancong. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Pasanggrahan memiliki fungsi yang bersifat multidimensional. Bangunan ini berada di antara kepentingan birokrasi kolonial, kebutuhan kenyamanan perjalanan,

¹² Officiële Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch-Indië, *Pasanggrahan in Nederlandsch-Indië* (Batavia: Landsdrukkerij, 1937), hal. 12-14.

dan perkembangan awal pariwisata. Penyediaan fasilitas fisik juga memperlihatkan bagaimana pemerintah kolonial memperluas kehadiran serta kontrolnya melalui infrastruktur pelayanan dan jaringan perjalanan. Dengan demikian, Pasanggrahan tidak hanya menjadi tempat singgah, tetapi juga instrumen yang menghubungkan administrasi, mobilitas, rekreasi, dan kekuasaan kolonial¹³.

Arsitektur Pasanggrahan umumnya mengikuti kolonial tropis, yaitu perpaduan antara unsur arsitektur Eropa dan unsur lokal yang disesuaikan dengan kondisi iklim Indonesia. Perkembangannya merupakan proses adaptasi yang kompleks sekaligus mencerminkan relasi kuasa dan interaksi budaya antara pihak kolonial dan masyarakat setempat. Karena itu, Pasanggrahan tidak tepat dipahami sebagai salinan mentah bangunan Eropa. Bangunan ini merupakan hasil penyesuaian terhadap lingkungan tropis yang panas dan lembap, curah hujan yang tinggi. Ketersediaan bahan bangunan lokal, teknik konstruksi dan pengetahuan arsitektur setempat. Ciri fisik arsitektur kolonial tropis antara lain Atap tinggi dan lebar, berfungsi melindungi bangunan dari hujan serta membantu sirkulasi udara. beranda luas yang berperan sebagai ruang transisi antara ruang luar dan ruang dalam. Ventilasi dan bukaan besar, untuk mengurangi panas dan kelembapan. Rencana bangunan, tampak, bahan, dan sistem konstruksi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan¹⁴.

Penerapan beranda depan dan belakang pada bangunan pasanggrahan. Beranda luas di bagian depan dan belakang pasanggrahan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai ruang sosial dan filter termal. Sebagai filter termal, beranda melindungi dinding dan ruang dalam dari paparan langsung sinar matahari serta tampias hujan deras. Ruang

¹³ Tomy Wijaya dan Fatimah Alauwiyah, *loc. Cit.*, hal. 514-523

¹⁴ Fauza Hastatid kk, "Karakteristik Arsitektural Bangunan Indis Pada Perumahan Pegawai PJKA Pengok Blok A & B di Yogyakarta" *SADE*, vol 1, no.1, (2021), hal. 28-41

ini membantu mengurangi panas yang masuk ke bangunan dan meningkatkan kenyamanan termal di iklim tropis. Sebagai ruang transisi, beranda menghubungkan ruang luar dan ruang dalam, sekaligus menciptakan peralihan bertahap antara area publik dan privat. Sebagai ruang sosial, beranda depan berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan menyelenggarakan pertemuan semi-publik. Dalam konteks kolonial, ruang ini juga digunakan untuk rapat informal dengan para kepala adat lokal. Dengan demikian, beranda tidak hanya merupakan elemen estetis, tetapi juga bagian penting dari strategi adaptasi iklim dan praktik sosial pasanggrahan¹⁵.

Mengingat wilayah pedalaman tropis memiliki tingkat kelembapan yang sangat tinggi, pesanggrahan kolonial umumnya dilengkapi dengan langit-langit yang sangat tinggi, berkisar antara 4 hingga 6 meter. Pintu dan jendela dirancang berukuran besar dengan sistem daun pintu ganda yang dipadukan dengan jalusi atau kisi-kisi kayu. Rancangan ini memungkinkan terjadinya sirkulasi udara silang secara terus-menerus selama 24 jam. Dengan demikian, suhu di dalam bangunan tetap sejuk dan nyaman meskipun tidak menggunakan pendingin udara mekanis. Pastinya pada Pasanggrahan yang merupakan tempat bersinggah maupun bermalam pastinya sudah ada fasilitas seperti tempat tidur sementara, tetapi juga ruang menerima tamu, beristirahat yang menampilkan wibawa sosial¹⁶.

Dinding Pasanggrahan umumnya dibangun menggunakan konstruksi bata tebal dengan plesteran kapur. Material ini membantu meredam panas pada siang hari dan mempertahankan kehangatan pada malam hari. Pada Pasanggrahan kelas utama, lantai dapat menggunakan tegel PC berpola dekoratif atau bahkan marmer mewah yang

¹⁵ Ismail dan Nurhidayah, "Identifikasi Arsitektur Indische Empire Style pada Bangunan Landhuizen Kelengan di Kota Semarang," *Sarga: Journal of Architecture*, Vol. 20, No. 1 (2026), hal. 4-5.

¹⁶ Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2010), hal. 82

didatangkan dari Eropa. Penggunaan material tersebut memberikan kesan kokoh, monumental, dan berkelas, sekaligus menegaskan status sosial para penghuninya di hadapan masyarakat. Bentuk Pasanggrahan cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan penginapan-penginapan besar. Tipologi bangunan kolonial di beberapa kota umumnya berukuran relatif kecil. Meskipun demikian, bangunan tersebut dirancang secara adaptif terhadap iklim dan kondisi alam setempat, misalnya melalui penggunaan teras, bukaan lebar, atap yang sesuai, serta ruang-ruang yang mendukung sirkulasi udara alami. Dengan demikian, Pasanggrahan tidak hanya berfungsi sebagai tempat singgah, tetapi juga mencerminkan perpaduan antara kebutuhan kolonial dan karakter arsitektur lokal¹⁷.

Pasanggrahan atau *logement* merupakan bangunan yang berakar dari tradisi tempat istirahat bangsawan. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengadopsinya sebagai fasilitas semi-resmi bagi pejabat, pegawai, dan pelancong yang melakukan perjalanan. Dalam sistem kolonial, Pasanggrahan tidak hanya berfungsi sebagai tempat bermalam, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan birokrasi pemerintahan, infrastruktur perjalanan dan mobilitas administrasi, tata ruang kolonial yang mendukung pengawasan serta pengelolaan wilayah. Secara arsitektural, Pasanggrahan umumnya menampilkan karakter bangunan kolonial tropis.

Karakter tersebut terlihat melalui perpaduan unsur Eropa dan lokal, seperti penggunaan serambi, bukaan lebar, ventilasi besar, serta tata bangunan yang menyesuaikan diri dengan iklim panas dan lembap Indonesia. Dengan demikian pada Pasanggrahan Kotanopan, konsepnya menunjukkan bahwa bangunanya bukan sekedar bangunan biasa. Pasanggrahan Kotanopan bukan hanya tempat persinggahan,

¹⁷Adyt Alkautsar dan La Ode Rabani, "Arsitektur Indis dan Perubahan Sejarah Kota Magelang 1906-1942" *SASDAYA Gadjah Mada Journal of Humanities*, Vol. 6. No. 1, (2022), hal.35-48

melainkan juga produk dari kebijakan kolonial, kebutuhan mobilitas administratif, serta proses adaptasi antara arsitektur Eropa dan kondisi lokal. Dengan demikian, bangunan ini memiliki nilai historis, arsitektural, sosial, dan politis yang saling berkaitan.

C. Kondisi Sosial Politik Hindia Belanda di Kotanopan Kabupaten Mandailing

Setelah Perang Padri, pengaruh kolonial masuk ke Mandailing. Perang itu juga memberi kesempatan kepada Belanda untuk mulai campur tangan di wilayah Mandailing. Dari wilayah Sumatra secara keseluruhan, Tahun 1824 Belanda menguasai hampir seluruh sumatera. Karena itu, perluasan kekuasaan Belanda ke daerah pedalaman merupakan bagian dari upaya mereka memperkuat kontrol di seluruh Sumatra. Perluasan kekuasaan Belanda tidak hanya dilakukan lewat perang, tetapi juga melalui aturan pemerintahan dan penyebaran pengaruh politik serta budaya. Di berbagai daerah di Sumatra, Belanda umumnya tidak langsung menghapus kekuasaan lokal. Sebaliknya, para penguasa setempat ditundukkan, diajak berunding, lalu dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan kolonial. Di wilayah Tapanuli, Belanda juga menjalankan *Pax Netherlandica*, yaitu keadaan aman yang dibuat untuk memperkuat kekuasaan kolonial dan mendukung kegiatan misionaris. Kondisi ini kemudian memicu perlawanan dari pemimpin-pemimpin lokal yang menganggapnya sebagai ancaman bagi kekuasaan mereka¹⁸

Kotanopan adalah bagian *Onderafdeeling* Mandailing Natal di *Residentie* Tapanuli, yang didirikan setelah 1906 dari Pantai Barat Sumatra. Itu berada di pusat selatan dengan *Controleur* di Pasanggrahan Kotanopan di tahun 1930, yang bertanggung jawab atas pajak, perkebunan, dan hukum adat. Asisten Residen Tapanuli pada 1840 berlokasi di Panyabungan, cabang selatan Kotanopan. Kebijakan Politik Etis

¹⁸ Natalia dan Muhammad Fendi Aditya "Dampak Perang Batak pada Tahun 1878 - 1907 Terhadap Penyebaran Agama Kristen di Sumatera Utara" vol. 17 (2020)

1901 meningkatkan infrastruktur, seperti jalan dan HIS, tetapi secara eksploitatif melalui sistem cultuur karet. Administrasi dilakukan oleh raja-raja adat lokal, yang diawasi oleh Belanda¹⁹.

Awal tahun 1900-an pemerintah kolonial mulai memperkuat sistem administrasi di wilayah yang berada di luar pusat kekuasaan dengan membangun infrastruktur pendukung seperti jalan, kantor pemerintahan, dan tempat tinggal resmi untuk pejabat yang melakukan perjalanan dinas. Kotanopan dipilih sebagai lokasi pasanggrahan karena lokasinya yang strategis di selatan Residentie Tapanuli, tepatnya di jalur lintas utama Medan-Padang, Sumatera wilayah yang dilalui oleh kolonial dalam perjalanan. Iklimnya yang sejuk dari Pegunungan Bukit Barisan di ketinggian 500–1.000 mdpl, tempat ini adalah tempat yang bagus untuk beristirahat para kolonial setelah perjalanan panjang dari dataran rendah panas seperti Padangsidempuan. Selain itu, Kotanopan berfungsi sebagai pusat administrasi *Onderafdeeling* Mandailing Natal bagian selatan, dan membutuhkan fasilitas resmi untuk *Controleur* yang mengawasi perkebunan karet, pajak, dan keamanan untuk menghindari ancaman lokal²⁰.



Gambar 2.2 : Gunung Sorik Marapi Serta Keadaan Alam Kotanopan Tahun 1936

(Sumber : <http://hdl.handle.net/1887.1/item:727886>)

¹⁹ Bappeda Kabupaten Mandailing Natal, *Laporan Evaluasi Pemanfaatan Aset Bangunan Bersejarah Daerah* (Panyabungan: Bappeda Madina, 2011), hal. 04.

²⁰ Tomy Wijaya dan Fatimah Alauwiyah, *loc. Cit.*, hal. 514-523

Sungai Batang Gadis menyediakan sumber daya air dan akses logistik, dan lokasinya dekat dengan perbatasan Sumatera Barat meningkatkan tanggung jawab pengawasan lintas wilayah. *Tussen 1900 en 1930 fungeerde Mandailing als een overgangsgebied tussen traditioneel bestuur en een steeds meer gecentraliseerde koloniale bureaucratie. Door functionarissen zoals controleurs te stationeren en een duurzamer bestuurlijk netwerk op te zetten, trachtte de Nederlandse overheid de regio te integreren in het bestuur van Nederlands-Indië. Dit proces ging gepaard met koloniale inspanningen om de veiligheid, de belastingheffing en de stroom van plantageproducten en handelsgoederen te reguleren*²¹. Het koloniale gezag in de regio verliep voornamelijk via 'indirect bestuur': lokale instellingen werden geïntegreerd in de koloniale staatsbureaucratie in plaats van volledig te worden ontmanteld. Tegelijkertijd vonden koloniale inspanningen plaats om de veiligheid, de belastingheffing en de stroom van plantageproducten en handelsgoederen te beheren²². Kekuasaan kolonial di daerah bekerja terutama melalui *indirect rule*, yakni dengan menginstitusikan pranata lokal ke dalam birokrasi negara kolonial, bukan menghancurkannya sepenuhnya.

Kebijakan Hindia Belanda pada tingkat pusat juga memengaruhi perkembangan politik kolonial di daerah ini, terutama setelah munculnya politik etis dan desentralisasi pada awal abad ke-20. Kebijakan ini mendorong pembentukan perangkat pemerintahan yang lebih teratur, termasuk meningkatkan fungsi administrasi di daerah-daerah luar Jawa. Wilayah Mandailing terkhusus Kotanopan, kondisi sosial-politik kemungkinan

²¹ “vervoer naar Kota-Nopan 2 da^en. Te Kota-Nopan tot aflevering der koffij. ... i ua° Voor de terugreis van, Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 24, 1862 (1e deel), no 1” *internationale archieven* <https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/results?query=kotanopan&page=1&maxperpage=3&coll=dts> (toegang 05 mei 2026)

²² “vervoer naar Kota-Nopan 2 da^en. Te Kota-Nopan tot aflevering der koffij. ... i ua° Voor de terugreis van, Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 24, 1862 (1e deel), no 1” *internationale archieven* <https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/results?query=kotanopan&page=1&maxperpage=3&coll=dts> (toegang 05 mei 2026)

terbentuk sebagai gabungan dari pengawasan pejabat kolonial, peran raja dan pemuka adat, otoritas ulama, serta masyarakat desa yang harus berhadapan dengan aturan kolonial sambil tetap mempertahankan struktur sosial lokal. Dengan demikian, kehidupan lokal lebih tepat dipahami sebagai hasil negosiasi yang terus-menerus antara pemerintah kolonial, tokoh adat, dan tokoh agama, bukan sebagai dominasi sepihak²³.

Kasus pada Mandailing, ini menyebabkan aktivitas birokrasi kolonial meningkat di daerah pedalaman yang sebelumnya tidak tersentuh secara administratif. Akibatnya, kehadiran pejabat kolonial menjadi lebih kuat dan membutuhkan fasilitas yang memadai untuk mendukungnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kotanopan pada masa Hindia Belanda berada dalam *lanskap* sosial politik Mandailing yang ditandai oleh *penetrasi* negara kolonial, *kooptasi elite* lokal, politisasi adat, pengawasan terhadap Islam, dan munculnya mobilisasi Pendidikan keagamaan. Dengan demikian, bangunan seperti pasanggrahan tidak hanya berfungsi sebagai tempat singgah, tetapi juga sebagai bagian dari infrastruktur kekuasaan kolonial di ruang lokal.

Selama periode ini, birokrasi Hindia Belanda diperluas ke Mandailing sebagai bagian dari upaya untuk membuat wilayah taklukan lebih mudah dikendalikan. Prakteknya, birokrasi kolonial memerlukan kantor, rumah dinas, jalur transportasi, dan tempat istirahat resmi bagi pejabat yang bergerak antar wilayah. Kebutuhan ini menyebabkan munculnya bangunan kolonial seperti *logement*, Pasanggrahan, dan rumah *kontrolir*. birokrasi kolonial juga membutuhkan fasilitas representatif untuk menegaskan status sosial pejabat Belanda dibandingkan dengan penduduk lokal. Bangunan penginapan resmi dibangun dengan standar yang lebih tinggi daripada rumah penduduk dalam hal ukuran, tata ruang, dan material yang digunakan. Perbedaan ini

²³ Alawiyah, *op.cit.*, hal. 02-14

tidak hanya fungsional tetapi juga simbolik, karena menunjukkan jarak antara yang menguasai dan penguasa²⁴.

Pasanggrahan dibangun untuk memenuhi kebutuhan logistik administratif Politik Etis Belanda setelah tahun 1901, dan menyediakan akomodasi berkualitas tinggi bagi *Controleur* Mandailing Natal dan pejabat tinggi yang transit untuk mengawasi perkebunan karet, komoditas utama Tapanuli Selatan. Alasan utama adalah kenyamanan kolonial di pedalaman, yang ditunjukkan oleh iklim sejuk dan fasilitas yang lengkap. Koordinasi birokrasi, yang ditunjukkan oleh rapat dengan raja adat dan keamanan, yang ditunjukkan oleh terowongan evakuasi. *De bouw werd uitgevoerd door het Nederlands-Indische koloniale bestuur via de dienst Burgerlijke Openbare Werken (BOW) van de residentie Tapanuli, waarbij gebruik werd gemaakt van Mandailing-arbeiders die op loonbasis werkten. Er is geen specifieke architect bekend; dit was gebruikelijk bij de BOW tijdens de koloniale periode in de tropen*²⁵.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

²⁴ Askolani Nasution, *Budaya Mandailing* (Banda Aceh : Balai Pelestarian Nilai budaya Aceh, 2018) , hal. 5-6

²⁵ “ die op de helling van den werkenden vulkaan Sorik Merapi ontspringen, westelijk van Kotanopan, Landbouw; tijdschrift der Vereeniging van Landbouwconsulenten in Nede” internationale archieven, <https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/results?query=kotanopan+pasanggrahan+&page=2&coll=dts> (toegegang 05 mei 2026)

BAB III

SEJARAH PEMBANGUNAN DAN DINAMIKA FUNGSI PASANGGRAHAN KOTANOPAN (1930-2013)

A. Sejarah Pasanggrahan Kotanopan

1. Latar Belakang Pembangunan Pasanggrahan

Pendudukan Belanda di Mandailing bermula pada tahun 1833, ketika pasukan Belanda mendarat di Natal dan kemudian bergerak ke pedalaman hingga mencapai Pakantan dan Mandailing. Selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda membangun basis militer di Pakantan sebagai upaya untuk menstabilkan wilayah yang telah dikuasai sekaligus memperluas kontrol ke daerah Angkola dan Sipirok. Proses ini menunjukkan bahwa sejak awal, penguasaan atas Mandailing tidak hanya dilakukan melalui kekuatan militer, tetapi juga disertai dengan pembangunan sarana fisik sebagai instrumen pengendalian politik dan teritorial¹.

Setelah kekuasaan kolonial semakin menguat, pusat administrasi Mandailing-Angkola dipindahkan ke Panyabungan pada tahun 1838 melalui pembentukan jabatan *Resident Assistant of Mandailing-Angkola*. Dalam skala yang lebih luas, pembentukan wilayah administrasi kolonial di Sumatra tidak semata-mata ditentukan oleh batas alam, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor topografi, ekonomi, budaya, dan politik. Oleh karena itu, pembangunan sebuah pasanggrahan di Kotanopan pada tahun 1930 perlu dipahami sebagai

¹ Natalia dan Khoiruddin Ritonga "The Influence of Dutch Colonial Architecture: A Case Study of Dutch Heritage Buildings in Langsa City," *Journal Of Samudra Social Studies Research(jsssr)* vol. 3 no.1 (2025), hal. 59-65

bagian dari strategi kolonial dalam menata titik-titik penting dalam jaringan pemerintahan pedalaman Mandailing.

Tapanuli dikenal sebagai wilayah bergunung dan sulit dijangkau, sehingga transportasi menjadi hambatan utama bagi ekspansi ekonomi dan administrasi. *Resident F.C. Vorstman* pada 1921 menegaskan bahwa pembangunan jalan utama merupakan salah satu sarana paling kuat untuk memajukan daerah yang tertinggal secara ekonomi. Infrastruktur menjadi faktor besar dalam integrasi ekonomi Indonesia kolonial, bahkan lebih penting daripada banyak kebijakan Etis dalam mendorong perkembangan wilayah. Pasanggrahan di Kotanopan dibangun bukan sebagai bangunan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fasilitas pendukung mobilitas pejabat, tamu pemerintah, dan arus administrasi di jalur pedalaman¹.

2. Proses Berdirinya Pasanggrahan Kotanopan

Pembangunan Pasanggrahan Kotanopan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Kotanopan sebagai salah satu wilayah yang memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda di kawasan Mandailing. Jauh sebelum berdirinya bangunan Pasanggrahan pada tahun 1930, Kotanopan telah memiliki posisi penting dalam jaringan pemerintahan kolonial. Pada abad ke-19, wilayah Kotanopan menjadi salah satu tempat yang mendapat perhatian pemerintah kolonial karena kedudukannya dalam penguasaan wilayah Mandailing. Setelah Belanda memperluas kekuasaannya ke kawasan

¹ Jeroen Touwen, "Moving towards a National Economy in Late Colonial Indonesia" *Itinerario* vol. 23 (1999)

Mandailing pada masa Perang Padri, Kotanopan berkembang menjadi salah satu pusat pemerintahan dan aktivitas administratif kolonial².

Kotanopan juga memiliki posisi geografis yang penting karena berada pada jalur perjalanan yang menghubungkan berbagai wilayah di Sumatra bagian tengah dan utara. Menghubungkan kawasan seperti Padang, Bukittinggi, dan wilayah Tapanuli. Dengan demikian, pembangunan Pasanggrahan Kotanopan pada tahun 1930 dapat dipahami dalam konteks perkembangan fasilitas pemerintahan dan perjalanan kolonial pada masa tersebut. Pasanggrahan Kotanopan merupakan bangunan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1930. Bangunan tersebut memiliki sejumlah ruang tamu, teras, 11 kamar tidur, kamar mandi, toilet, serta halaman yang luas. Karakteristik fisik tersebut menunjukkan bahwa bangunan sejak awal dirancang bukan sebagai rumah tinggal sederhana, melainkan sebagai bangunan yang mampu menampung kebutuhan tempat tinggal dan persinggahan dalam waktu tertentu.

Pembangunan pada tahun 1930 juga menunjukkan bahwa keberadaan bangunan tersebut merupakan bagian dari perkembangan infrastruktur kolonial di Kotanopan pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda. Pada periode tersebut, pemerintah kolonial tidak hanya membangun fasilitas yang berkaitan langsung dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga mengembangkan berbagai sarana yang mendukung mobilitas pejabat dan perjalanan antardaerah. Pasanggrahan menjadi salah satu bentuk fasilitas tersebut. Secara umum, bangunan pasanggrahan digunakan sebagai tempat persinggahan atau

² Budi Agustono dan Junaidi, "The Dutch Colonial Economic Policy: Coffee Exploitation in Tapanuli Residency, 1849–1928" *Kemanusiaan* Vol. 25 No. 2 (2018), hal. 49–71

penginapan bagi pejabat pemerintah dan orang-orang yang melakukan perjalanan melalui wilayah tertentu³.



Gambar 3,1 : Keadaan Pasar Kotanopan yang berada Didepan Pasanggrahan Tahun 1936

(Sumber : <http://hdl.handle.net/1887.1/item:729247>)

Pemilihan Kotanopan sebagai lokasi pembangunan dapat dipahami dari kedudukannya sebagai wilayah administratif yang penting dan sebagai salah satu titik perjalanan menuju wilayah pedalaman. Pada masa kolonial, Kotanopan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pemerintahan, tetapi juga menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat Mandailing. Oleh karena itu, pemerintah kolonial membutuhkan fasilitas yang dapat menunjang keberadaan pejabat serta perjalanan dinas ke wilayah tersebut. Dalam konteks ini, pembangunan Pasanggrahan pada tahun 1930 merupakan bagian dari upaya penyediaan fasilitas fisik yang mendukung sistem pemerintahan kolonial.

Bentuk bangunan Pasanggrahan juga memperlihatkan karakter bangunan kolonial yang menyesuaikan kebutuhan iklim dan fungsi bangunan. Bangunan tersebut memiliki teras, banyak kamar, ruang tamu, ruang belakang, kamar mandi, toilet, dan halaman yang luas. Kelengkapan ruang tersebut menunjukkan bahwa bangunan dirancang untuk digunakan oleh lebih dari satu

³ Dwi Kurnia Sandy “Payakumbuh: Kajian Arkeologi Perkotaan di Keresidenan Pantai Barat Sumatra” *PURBAWIDYA*, vol.14 no.1 (2025), hal. 129-150

orang dan untuk memenuhi kebutuhan penginapan dalam perjalanan. Dengan demikian, aspek arsitektural bangunan dapat dikaitkan dengan fungsi praktisnya sebagai tempat tinggal sementara dan tempat persinggahan.

Proses berdirinya Pasanggrahan Kotanopan dapat dipahami melalui beberapa tahap. Pertama, adanya perkembangan Kotanopan sebagai wilayah yang memiliki kedudukan administratif dalam pemerintahan kolonial Belanda. Kedua, meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas pemerintahan dan akomodasi bagi pejabat yang melakukan perjalanan dinas. Ketiga, posisi Kotanopan yang berada pada jalur perjalanan antardaerah menjadikan wilayah tersebut membutuhkan tempat persinggahan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan. Keempat, kebutuhan tersebut diwujudkan melalui pembangunan sebuah bangunan yang memiliki ruang cukup banyak dan fasilitas yang mendukung fungsi penginapan. Pembangunan bangunan yang kemudian dikenal sebagai Pasanggrahan Kotanopan tersebut diperkirakan berlangsung pada tahun 1930 berdasarkan sumber sejarah lokal dan penelitian mengenai bangunan tersebut⁴.

Dengan demikian, berdirinya Pasanggrahan Kotanopan pada tahun 1930 merupakan bagian dari perkembangan infrastruktur pemerintahan dan jaringan mobilitas pada masa kolonial Belanda. Bangunan tersebut lahir dalam lingkungan pemerintahan kolonial yang telah menempatkan Kotanopan sebagai salah satu pusat administrasi di kawasan Mandailing. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tempat tinggal sementara, tetapi juga dengan

⁴Rahmat Kurnia Lubis "Kotanopan: Desa Tua, Bertuah dan Bersejarah di Mandailing Natal," rentak.idSenin, 10 Februari 2025 , <https://rentak.id/kotanopan-desa-tua-bertuah-dan-bersejarah-di-mandailing-natal/> (akses 11 mei 2026)

aktivitas pejabat pemerintahan dan perjalanan antardaerah. Fungsi tersebut kemudian berkembang mengikuti perubahan keadaan politik dan pemerintahan setelah berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda. Oleh karena itu, pembangunan Pasanggrahan Kotanopan pada tahun 1930 menjadi titik awal penting untuk memahami perubahan fungsi bangunan tersebut sampai periode berikutnya⁵.

3. Arsitektur dan Kondisi Awal Bangunan

Pasanggrahan Kotanopan menunjukkan ciri-ciri arsitektur kolonial tropis yang lazim disebut gaya Indis, yang merujuk pada perpaduan elemen arsitektur Eropa dengan penyesuaian terhadap iklim tropis Nusantara. Pasanggrahan Kotanopan memiliki bentuk rumah panggung bergaya tropis Belanda dengan luas lahan yang besar. Ruang tamu yang luas, teras depan, kamar mandi, toilet, dan halaman yang indah. Pasanggrahan Kotanopan, wujudnya lebih berupa bangunan satu lantai dengan ruang-ruang besar dan 11 kamar penunjang, tidak ada satu pun tulisan dalam kumpulan dokumen ini yang menjelaskan secara spesifik kapan peletakan batu pertama, siapa pemborongnya, seperti apa gambar rencananya, berapa biayanya, atau berapa lama pembangunan Pasanggrahan Kotanopan berlangsung dapat di selesaikan.⁶

Dinding kayu putih tebal yang tahan terhadap iklim lembab, atap genteng tinggi untuk ventilasi alami, verandas luas dengan tiang penyangga untuk sirkulasi udara, dan pintu-jendela kayu unik dengan ukiran halus yang mengikuti gaya kolonial Eropa. Tahap konstruksinya yang mengandalkan tenaga kerja masyarakat di bawah sistem kolonial. Perabot kayu dengan motif

⁵ Dahlan Batubara, "Mandailing Natal Awal Tahun 1900" Selasa, 7 Jun 2022, <https://mandailingonline.com/mandailing-natal-awal-tahun-1900/> (akses 18 mei 2026)

⁶ Prabhu dkk "Comprehensive assessment and material analysis of a heritage structure: proposing an effective restoration and retrofitting strategy" *Journal of Asian Architecture and Building Engineering* vol.25 no.1

Belanda di dalamnya, seperti lemari dan kursi kuno, sebagian masih utuh. *In 1936 werd marmer aangebracht in het Pasanggrahan (gastenverblijf) van Kotanopan – een project dat 15.000 gulden uit de gemeentekas kostte en waarbij lokale arbeiders werden ingezet – terwijl het gastenverblijf op dat moment al klaar was voor gebruik*⁷.

Pengalaman kolonial di berbagai kota di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan bangunan publik kerap berlangsung seiring dengan persiapan administratif yang lebih luas. Seperti, pembangunan jalan penghubung mendorong hadirnya gedung-gedung pemerintah dan permukiman dengan tata ruang yang tertata. Pada waktu yang sama, kebutuhan terhadap infrastruktur penting seperti jalan, rel, rumah, gedung pemerintahan, stasiun, rumah sakit, dan sekolah meningkat pesat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembangunan pasanggrahan di Kotanopan tahun 1930 juga mengikuti logika kolonial yang menempatkan bangunan tersebut sebagai bagian pelengkap dari sistem pemerintahan dan konektivitas para kolonial⁸.

Secara fisik, bangunan tetap kokoh setelah 96 tahun berdiri, dengan 80% elemen orisinal seperti dinding luar, pintu-jendela, dan verandas yang terjaga. Namun, lantai interio diubah menjadi lantai kontemporer untuk kenyamanan penginapan. Setelah kemerdekaan pada tahun 1950-an, ada beberapa perbaikan kecil, termasuk fokus sanitasi dan cat ulang berkala untuk mencegah pembusukan tropis. Tiga kamar diperbaiki selama Jelajah Sepeda Sabang-

⁷ “verlichting van Kotanopan voor één nacht, en over het leggen van een marmeren vloer in de pasanggrahan, Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers, 1936,” <https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/results?query=kotanopan+pasanggrahan+&page=1&maxperpage=20&coll=ds> (toegang 09 mei 2026)

⁸ Arif Sarwo Wibowo “Study of building typology of school constructed during the Dutch Colonial Period in Indonesia. Case study of Hoogere Burgerschool (HBS) in Bandung” *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, vol.126 no.1 (2018), hal.1-5

Padang 2013, tetapi secara keseluruhan, fasilitas ini beroperasi sebagai aset milik Pemprov Sumatera Utara.

Jenis bahan yang digunakan pada Pasanggrahan tidak menyebutkan secara rinci. Namun, berdasarkan karakteristik umum bangunan kolonial tropis, bahan yang digunakan cenderung mengutamakan kekuatan struktur, daya tahan terhadap iklim lembap, dan kemudahan pemeliharaan. Bangunan Pasanggrahan yang masih berdiri hingga hari ini menunjukkan bahwa mereka relatif kokoh dan dirancang untuk bertahan lama. Ketahanan fisik ini merupakan salah satu karakteristik penting bangunan kolonial yang dibangun untuk waktu yang lama, terutama untuk bangunan administratif⁹.

Bangunan Pasanggrahan juga mencerminkan keadaan sosial-politik saat kolonial. Bangunan besar dengan halaman luas, banyak kamar, dan fasilitas yang lengkap menunjukkan perbedaan kelas sosial antara pejabat kolonial dan orang-orang yang tinggal di Kotanopan. Dalam masyarakat kolonial, bangunan resmi seperti Pasanggrahan adalah simbol kekuasaan dan kehadiran negara selain fasilitas praktis. Bangunan yang menonjol secara visual di pusat kota atau kecamatan menunjukkan dominasi Belanda dalam tata ruang kota.

Arsitektural Pasanggrahan dapat dianggap sebagai simbol material kekuasaan kolonial. Pasanggrahan Kotanopan bukan sekadar bangunan tua, melainkan artefak sejarah yang merekam bagaimana kolonialisme bekerja melalui ruang, arsitektur, dan infrastruktur. Kajian terhadap proses pembangunannya penting untuk memahami bahwa wilayah Kotanopan

⁹ Koko Hendri Lubis dkk, *Perintis kemerdekaan di Kotanopan – Mandailing* (Medan, Hikmah Sumut, PIDM dan Perdana Publishing : 2018)

ditempatkan dalam struktur kekuasaan Hindia Belanda, sekaligus melihat warisan fisik itu masih bertahan sebagai saksi sejarah hingga sekarang¹⁰.

B. Fungsi Pasanggrahan Kotanopan

1. Masa Penjajahan (1930-1945)

a. Sebagai Penginapan dan Pendukung Administrasi Pemerintahan Belanda

Bangunan pasanggrahan di masa Hindia Belanda adalah bagian dari sistem administrasi pemerintahan kolonial. Pemerintah Hindia Belanda memerlukan sarana pendukung yang dapat mendukung mobilitas pejabat pemerintah saat menjalankan tugas di berbagai wilayah. Perjalanan antar daerah membutuhkan waktu yang cukup lama karena luasnya wilayah administrasi dan kondisi geografis Indonesia. Akibatnya, diperlukan tempat persinggahan untuk memastikan aktivitas pemerintahan berjalan lancar. Pasanggrahan berfungsi sebagai salah satu infrastruktur yang mendukung pemerintahan kolonial dalam perjalanan Belanda selama di kotanopan¹¹.

Awal tahun 1900-an pemerintah kolonial mulai memperkuat sistem administrasi di wilayah yang berada di luar pusat kekuasaan dengan membangun infrastruktur pendukung seperti jalan, kantor pemerintahan, dan tempat tinggal resmi untuk pejabat yang melakukan perjalanan dinas. Dengan demikian, kebijakan kolonial mewajibkan pembangunan Pasanggrahan untuk memastikan bahwa wilayah dapat diawasi dengan mudah. Pasanggrahan biasanya dibangun di tempat yang strategis di jalur

¹⁰ Khoirun Nisa dkk, *Sumber Belajar Ppkn Di SD/MI Jas Merah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah)* (Padangsidempuan, Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI) : 2020), hal. 26

¹¹ Handinoto, "Daendels dan Perkembangan Arsitektur di Hindia Belanda Abad ke-19," *Dimensi: Journal of Architecture and Built Environment* vol.36, no.1 (2008), hal. 43–53.

perjalanan administratif, terutama di tempat-tempat yang memiliki potensi ekonomi dan peran penting dalam pemerintahan kolonial. Salah satu lokasi yang memenuhi kriteria tersebut adalah Kotanopan, yang merupakan daerah yang terhubung dengan pusat administrasi Selatan ¹².

Perkembangan kota pada masa kolonial Hindia Belanda mengikuti perkembangan sistem fasilitas pemerintahan kolonial salah satunya bangunan Pasanggrahan. Pasanggrahan Kotanopan itu dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan pemerintah kolonial untuk fasilitas yang membantu birokrasi di Mandailing. Lokasinya di jalur transportasi antar daerah membuat Kotanopan memiliki peran penting dalam sistem administrasi kolonial. Oleh karena itu, Pasanggrahan Kotanopan dapat dianggap tidak hanya sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem administratif pemerintah Hindia Belanda.



Gambar 3.2 : Suasana Pasanggrahan Kotanopan Tahun 1936
(Sumber : <http://bll.handle.net/1887.1/item/729715>)

Sistem birokrasi kolonial Belanda, mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah, dibangun secara berjenjang dan memerlukan kerja sama yang kuat antar lembaga. Berbagai sarana pendukung dibangun

¹² Dendy Reza Juliansyah Siregar dan Pujiati, “Mengguris Karet, Budaya Penopang Hidup Masyarakat Kotanopan,” *Peshum : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol.4, No.5, (2025), hal. 1-8

dalam sistem kolonial pasanggrahan tidak hanya digunakan sebagai tempat beristirahat, tetapi juga menjalankan peran birokrasi. Bangunan ini dapat digunakan sebagai tempat pertemuan sementara, untuk menerima laporan administratif, dan untuk melakukan kegiatan pemerintahan di wilayah yang dikunjungi oleh pejabat kolonial.

Adanya Pasanggrahan memungkinkan administrasi dilakukan secara lebih terorganisir. *In de pasanggrahan (het gouvernementsgastenverblijf) van Kotanopan vond een bespreking plaats met de koloniale resident en dr. F.H. Visman – lid van de Raad van Indië en voormalig regeringscommissaris voor bestuurshervorming. Visman reisde destijds door Sumatra om te beoordelen welke stad als hoofdstad van het eiland zou moeten dienen. Volgens de planning zou hij vanuit Kotanopan doorreizen naar Prapat om zich daar bij resident Bouwes Bavinck te voegen.*¹³

Fungsi birokrasi ini menunjukkan bahwa struktur sistem kontrol pemerintahan yang lebih dari sekadar sarana fisik. Pemerintah kolonial memerlukan alat yang dapat menjamin hubungan antara pusat administrasi dan wilayah yang jauh. Sehubungan dengan Pasanggrahan Kotanopan, fungsi birokrasi dapat dikaitkan dengan tugas pemerintahan pejabat kolonial di Mandailing. Selama kunjungan pejabat ke daerah tersebut, bangunan

¹³ Sumatra Dr. F. H. Visman. Ongesteld Geworden Kotanopam” ft voorgedaan. Zijn toestand maakte het volgens onze inlichtingen nog twijfelachtig of hij wel uit. Kotanopan, waar hij in de pasanggrahan logeert, zou mogen worden getransporteerd. 18 juni 1936, hal 140, di akses 31 mei 2026, https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=kotanopan+pasanggrahan+&facets%5Btype%5D%5B%5D=artikel&facets%5Bspatial%5D%5B%5D=NederlandsIndi%C3%AB+%7C+Indonesi%C3%AB&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=1%7C20e_eeuw%7C19301939%7C&page=1&coll=ddd&identifier=ddd:010383670:mpeg21:a0057&resultsidentifier=ddd:010383670:mpeg21:a0057&rowid=1

tersebut dapat digunakan sebagai tempat persinggahan untuk menyelesaikan tugas administratif.

Pasanggrahan berfungsi sebagai tempat transit bagi pejabat pemerintah Hindia Belanda yang melakukan perjalanan dinas. Ini terjadi karena pemerintah kolonial perlu mengawasi berbagai wilayah administrasi yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi transportasi tidak secepat sekarang. Terbatasnya pilihan transportasi, perjalanan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah kolonial membangun beberapa tempat persinggahan untuk membantu pejabat pemerintah dalam perjalanan.

Bangunan Pasanggrahan biasanya memiliki fasilitas dasar seperti ruang istirahat dan ruang tamu, serta fasilitas penunjang lainnya yang dianggap penting bagi pejabat pemerintah. Keberadaan fasilitas ini menunjukkan bahwa Pasanggrahan memiliki fungsi praktis dalam membantu mobilitas administrasi kolonial. Bangunan ini dapat dianggap sebagai salah satu fasilitas yang dapat membantu pejabat pemerintah kolonial melakukan kunjungan kerja atau mengawasi wilayah di Mandailing, seperti kedatangan gubernur jenderal dan rombongannya.

Seperti yang ada pada koran lama bahwa telah datang Gubernur Jenderal dan rombongannya tiba di perbatasan antara Pantai Barat Sumatera dan Tapanoeli siang jam 12.00 WIB, di mana mereka disambut oleh Residen Tapanoeli. Di Pasanggrahan di Kotanopan. Gubernur Jenderal disambut secara adat dan diarak oleh anak-anak sekolah sampai depan pasanggrahan. Pada sore hari, Gubernur Jenderal menerima para kepala suku dan pejabat setempat. Gubernur Jenderal dan rombongannya

bermalam di wisma tamu, yang telah dilengkapi secara khusus untuk acara tersebut, sementara penerangan listrik juga telah dipasang ¹⁴

Bangunan pasanggrahan tidak hanya memiliki fungsi praktis, tetapi juga memiliki fungsi simbolis dalam sistem pemerintahan kolonial. Adanya bangunan pemerintahan di suatu wilayah dapat dianggap sebagai representasi kekuasaan pemerintah kolonial di wilayah tersebut. Arsitektur kolonial yang digunakan pada bangunan pemerintahan sering memperlihatkan perbedaan yang jelas dengan bangunan masyarakat lokal. Perbedaan ini tampak dari bentuk, tata ruang, penggunaan material, dan desain yang disesuaikan dengan iklim tropis. Gaya arsitektur ini berkembang dalam arsitektur Hindia Belanda dan menjadi identitas bangunan pemerintahan kolonial, seperti Pasanggrahan Kotanopan . Bangunan tersebut dipandang oleh masyarakat sebagai simbol kekuasaan yang berlaku pada saat itu ¹⁵.

b. Sebagai Fasilitas Administrasi Pemerintahan Militer Jepang

Masa pendudukan Jepang hingga Revolusi Kemerdekaan Indonesia merupakan periode transformasi yang signifikan dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Indonesia. Setelah pemerintahan kolonial Belanda berpindah ke pemerintahan militer Jepang pada tahun 1942, banyak fasilitas dan gedung yang pernah digunakan pemerintah Hindia Belanda harus disesuaikan dengan fungsinya. Struktur pemerintahan dan struktur pendukung administrasi kolonial, seperti pasanggrahan, mengalami

¹⁴ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Serambi, 2008), hal. 412.

¹⁵ Nugroho Notosusanto, *Pendudukan Jepang Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Politik Di Indonesia Tahun 1942-1945*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hal.65

perubahan juga. Saat ini, fungsi bangunan tidak lagi terbatas pada administrasi kolonial, kebutuhan militer, kondisi perang, dan dinamika perjuangan kemerdekaan Indonesia mulai memengaruhinya.

Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Dibandingkan dengan pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan militer Jepang lebih terpusat dan ketat. Untuk mendukung kepentingan militer Jepang, sejumlah fasilitas yang sebelumnya digunakan oleh pemerintah Belanda dialihkan. Kebutuhan perang Asia Timur Raya dipenuhi dengan sarana transportasi, gedung pemerintahan, dan fasilitas umum. Fungsi Pesanggrahan Kotanopan dipengaruhi oleh pergeseran pemerintahan dari Belanda ke Jepang. Pada masa kolonial Belanda, pesanggrahan itu terutama digunakan sebagai tempat persinggahan pejabat administrasi, tetapi pada masa pemerintahan Jepang, fungsi tersebut dapat berubah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pendudukan. Bangunan yang sebelumnya berfungsi sebagai fasilitas administratif dapat digunakan untuk mendukung operasi militer dan pemerintahan pendudukan Jepang¹⁶.

Perubahan struktur kekuasaan menyebabkan perubahan fungsi bangunan selama Revolusi Jepang. Kebijakan administratif yang berbeda diubah saat pemerintahan Jepang berpindah dari Belanda. Bangunan yang dulunya didirikan untuk mendukung birokrasi kolonial tidak lagi memenuhi fungsinya sepenuhnya. Pesanggrahan yang sebelumnya digunakan sebagai tempat singgah pejabat kolonial dapat digunakan untuk tujuan lain yang lebih sesuai dengan keadaan saat itu, seperti tempat pertemuan, pusat

¹⁶Serafica Gischa, "Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia", 6 Februari 2020 <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/134500469/sejarah-otonomi-daerah-di> (diakses 02 Juni 2026)

koordinasi, dan fasilitas sementara untuk kepentingan keamanan dan pemerintahan.

Masa pendudukan Jepang, Pasanggrahan Kotanopan digunakan untuk kebutuhan kantor atau pos administrasi pemerintahan militer, tempat persinggahan dalam perjalanan dinas militer dan pemerintahan juga sebagai pusat komunikasi serta pengumpulan informasi lokal fungsinya bergeser dari tempat peristirahatan pejabat kolonial dan pelancong menjadi bagian dari sistem administrasi, mobilitas, dan kontrol ruang Jepang. Perubahan tersebut sejalan dengan kebijakan Japanisasi yang menghapus simbol serta pengaruh Belanda dan mengadaptasi bangunan kolonial untuk kepentingan pemerintahan militer Jepang. Perubahan ini dapat dianggap sebagai adaptasi bangunan terhadap tuntutan sosial dan politik yang berubah dalam teori fungsionalisme struktur. Bangunan fisik dipertahankan, tetapi fungsi di dalamnya diubah. Perubahan fungsi ini menunjukkan bahwa keberadaan suatu bangunan dipengaruhi oleh tujuan awalnya dan kebutuhan masyarakat dan penguasa. Oleh karena itu, Pasanggrahan Kotanopan dapat dianggap sebagai bagian dari struktur sosial yang berubah sepanjang sejarah¹⁷

Kehidupan masyarakat Indonesia sangat berubah karena perang selama pendudukan Jepang dan Revolusi Kemerdekaan. Mobilitas penduduk meningkat, aktivitas pemerintahan berubah, dan beberapa area menjadi pusat kegiatan militer dan politik. Politik dan penggunaan ruang dipengaruhi oleh perang. Untuk keperluan perang, berbagai bangunan yang sebelumnya memiliki fungsi sipil sering kali diubah menjadi fasilitas

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 188

militer. Perubahan fungsi bangunan seperti ini banyak terjadi selama revolusi di Indonesia. Sumatra merupakan bagian penting dari perjuangan untuk kemerdekaan selama Revolusi Kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 hingga 1949. Karena ketidakpastian politik, pemerintahan dan aktivitas sosial berubah di berbagai tempat. Bangunan seperti Pasanggrahan Kotanopan dapat dianggap memiliki posisi penting dalam situasi seperti itu karena keberadaannya¹⁸ memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat singgah atau tempat pertemuan bagi tokoh pemerintahan atau tokoh perjuangan.

2. Pasanggrahan Masa Revolusi sampai Orde Lama (1945–1965)

a. Sebagai Tempat Pertemuan dan Pendukung Perjuangan

Berita tentang pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta di Jakarta pada 17 Agustus 1945 tidak segera sampai ke wilayah pedalaman Tapanuli Selatan. Kondisi ini disebabkan oleh ketatnya sensor yang diberlakukan tentara pendudukan Jepang, khususnya Rikugun, serta terganggunya berbagai sarana komunikasi. Akibatnya, informasi mengenai Proklamasi menyebar secara bertahap melalui jaringan komunikasi yang masih berfungsi dan hubungan antardaerah. Di Kotanopan, berita tersebut baru diketahui dan dikonfirmasi secara luas pada akhir Agustus 1945 melalui jaringan telegraf PTT, singkatan dari Post, *Telegraaf en Telefoon*, serta melalui para pemuda yang membawa kabar secara lisan dari Bukittinggi, Padang, dan Medan¹⁹.

¹⁸ Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), hal. 36.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah Sumatera Utara* (Medan: Depdikbud Sumatra Utara, 1978), hal. 105–108

Masa awal Orde Lama, kedatangan berita kemerdekaan mendorong terbentuknya konsolidasi spontan di kalangan elite terpelajar, ulama, serta para pemimpin adat atau raja-raja kuria. Kotanopan, yang secara historis dikenal sebagai salah satu basis pergerakan kebangsaan di Tapanuli Selatan dan tempat lahirnya tokoh-tokoh nasional seperti Mr. Sutan Takdir Alisjahbana dan Willem Iskander, segera berkembang menjadi pusat mobilisasi masyarakat. Di wilayah ini, berbagai kelompok tersebut berperan dalam menyebarluaskan berita kemerdekaan, membangun dukungan terhadap Republik Indonesia, dan mengorganisasi gerakan politik serta sosial untuk mempertahankan kemerdekaan²⁰.

Salah satu aksi penting dalam menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di Kotanopan adalah pengambilalihan kompleks Pasanggrahan Kotanopan. Pada awal September 1945, sekelompok pemuda pergerakan yang dipimpin oleh tokoh lokal, seperti H. Ayyub Sulaiman Lubis, bersama mantan pemimpin laskar, mendatangi kompleks tersebut untuk mengakhiri pengawasan sisa-sisa kekuasaan Jepang dan mengambil alih bangunannya. Penguasaan itu ditandai dengan pengibaran Sang Merah Putih untuk pertama kalinya di tiang utama yang berada di halaman depan Pesanggrahan Kotanopan. Peristiwa ini memiliki makna yang penting karena menegaskan berakhirnya kekuasaan hukum serta administrasi Jepang dan Hindia Belanda di Mandailing Julu, sekaligus mengubah status Pasanggrahan Kotanopan dari *government rusthuis*, yaitu rumah peristirahatan milik

²⁰ Willer, *Het landschap Mandelhing voor zoo ver het onder rechtstreeksch beheer van het Gouvernement staat* (Batavia: Lange & Co., 1861), hal. 90–94

pemerintah kolonial, menjadi aset yang berada di bawah kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia²¹.

Pasanggrahan Kotanopan secara resmi difungsikan sebagai Sekretariat Komite Nasional Indonesia Daerah Kotanopan setelah pengambilan Alihan oleh Masyarakat Kotanopan. Aula utama dan kamar-kamar berukuran besar di bangunan tersebut digunakan sebagai kantor administrasi sementara sekaligus tempat berlangsungnya berbagai rapat intensif. Dalam kurun 1945–1947, Pasanggrahan menjadi pusat konsolidasi politik dan pemerintahan di tingkat lokal, terutama untuk menyelenggarakan musyawarah pemerintahan sipil. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, para pemimpin setempat membahas pembentukan struktur kewedanaan, penunjukan kepala daerah sipil Republik, pengaturan administrasi pemerintahan, serta pemeliharaan ketertiban umum di seluruh desa di wilayah Mandailing Julu²².

Pasanggrahan Kotanopan juga digunakan sebagai tempat pelaksanaan pengalihan ikatan dinas dan pengambilan sumpah bagi para pegawai birokrasi yang sebelumnya bekerja di bawah pemerintahan kolonial atau pendudukan Jepang. Dalam prosesi tersebut, para pamong praja menyatakan kesetiaan dan komitmen untuk mengabdikan sepenuhnya kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasanggrahan berfungsi sebagai ruang pertemuan yang netral bagi ulama, termasuk para pimpinan pesantren, dan para pemimpin adat atau raja-raja kuria. Pertemuan antara kedua unsur penting masyarakat ini

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hal. 112

²² Idfitriyani, "Adaptasi Fungsi Bangunan Kolonial sebagai Upaya Pelestarian Warisan Arsitektur di Tapanuli Selatan," *Jurnal Permukiman dan Warisan Budaya*, Vol. 4, No. 2 (2014), hal. 46

membantu menyatukan pandangan dalam menghadapi perubahan politik, menjaga ketertiban, serta mencegah perpecahan sosial dan konflik internal di Mandailing²³.

Tahun 1948 merupakan salah satu periode paling kritis dalam sejarah pertahanan Republik Indonesia. Penandatanganan Perjanjian *Renville* pada Januari 1948 menimbulkan kerugian teritorial yang sangat besar bagi Republik Indonesia. Melalui penerapan Garis *Demarkasi Van Mook*, Belanda mempersempit wilayah kekuasaan Republik, sekaligus memberlakukan blokade ekonomi dan militer secara ketat. Kebijakan tersebut mengakibatkan wilayah Republik di Jawa dan Sumatra semakin terisolasi serta mengalami keterbatasan dalam mobilitas, distribusi logistik, dan komunikasi²⁴.

Situasi politik dan militer yang penuh tekanan, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukannya konsolidasi nasional. Upaya ini bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat perlawanan rakyat di berbagai daerah, memperkuat persatuan nasional, serta menghimpun dukungan finansial melalui penerbitan obligasi. Dana tersebut diperlukan untuk membiayai kegiatan diplomasi dan mempertahankan kekuatan militer, termasuk rencana pembelian pesawat terbang yang diharapkan dapat membantu menembus blokade udara Belanda²⁵.

Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno, memutuskan untuk melaksanakan safari politik ke sejumlah kota strategis di Pulau Sumatra. Perjalanan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai kunjungan politik, tetapi

²³*Ibid.*,41-42

²⁴ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Serambi, 2008), hal. 448

²⁵ *Ibid.*,450

juga sebagai sarana untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan moral perjuangan rakyat, serta menggalang dukungan politik dan material bagi keberlangsungan perjuangan Republik Indonesia.

Rangkaian kunjungan kepresidenan di wilayah Tapanuli, Presiden Soekarno menempuh perjalanan darat dari Bukittinggi menuju Padangsidempuan dan Prapat. Pada 16 Juni 1948, Bung Karno bersama rombongannya tiba di Kotanopan. Pemerintah daerah bersama pimpinan Komite Nasional Indonesia di Kotanopan menetapkan Pasanggrahan Kotanopan sebagai pusat kegiatan protokoler kepresidenan sekaligus tempat menginap resmi Presiden Soekarno. Kedatangan Presiden Soekarno disambut dengan antusias oleh ribuan masyarakat. Selain warga setempat, penyambutan tersebut juga dihadiri oleh anggota laskar perjuangan, para ulama, serta tokoh-tokoh adat. Mereka memadati jalan utama dan halaman kompleks pasanggrahan untuk menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia.²⁶

Puncak kunjungan bersejarah ini ditandai dengan penyelenggaraan Rapat Akbar di halaman depan Pasanggrahan Kotanopan. Karena tidak tersedia panggung formal yang cukup besar untuk menampung jumlah massa yang hadir, Presiden Soekarno menggunakan tangga batu pada bagian depan Pasanggrahan Kotanopan sebagai tempat untuk menyampaikan pidatonya. Dari atas tangga, Presiden Soekarno menyampaikan pidato

²⁶ Ahmad Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 7: Periode Renville* (Bandung: Angkasa, 1978), hal. 180–185.

kebangsaan dengan gaya orasi yang khas, tegas, dan penuh semangat. Dalam pidatonya memuat beberapa pesan strategis sebagai berikut:

1). Peneguhan Kedaulatan Negara

Presiden Soekarno mengimbau seluruh masyarakat Mandailing agar tidak terpengaruh oleh politik adu domba atau *divide et impera* yang dijalankan Belanda. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan tetap setia mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2). Penggalangan Dana untuk Perjuangan

Presiden Soekarno mengajak masyarakat Kotanopan, termasuk para dermawan setempat, untuk memberikan dukungan material bagi perjuangan Republik. Dukungan tersebut dapat berupa harta benda, perhiasan emas, maupun uang tunai. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung penerbitan Obligasi Nasional 1948 dan pembelian pesawat terbang bagi Republik Indonesia, termasuk pesawat C-47 Dakota yang kemudian dikenal sebagai Seulawah.

3). Penguatan Persatuan antara Ulama dan Pemangku Adat

Presiden Soekarno menyerukan agar para ulama dan pemangku adat di Mandailing terus memperkuat kerja sama. Sinergi antara keduanya dipandang penting untuk menjaga persatuan masyarakat, membangun dukungan rakyat, serta memperkuat pertahanan di wilayah belakang selama berlangsungnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan²⁷.

²⁷ Askolani Nasution, *Kisah di Balik Tugu Perintis Kotanopan* (Panyabungan: Terbitan Mandailing Online, 2017), hal. 10–14



Gambar 3.3 : Penyampaian Pidato oleh Soekarno Ditangga Teras Pasanggrahan 16 juni 1948

(Sumber

:<https://kotanopankotasejarah.blogspot.com/2015/06/kotanopankotasejarah.com.html>)

Presiden Soekarno menempati Kamar Nomor 1, yaitu kamar utama yang terletak di bagian depan bangunan. Sejak 16 Juni 1948 hingga masa kini, Kamar Nomor 1 secara konsisten dikenal oleh masyarakat dan pemerintah daerah sebagai “Kamar Soekarno”. Penyebutan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penanda lokasi atau identitas fisik ruangan, tetapi juga mengandung makna simbolis. Kamar itu dipandang sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah, karena menjadi tempat Presiden Soekarno beristirahat ketika Kotanopan berperan sebagai salah satu wilayah penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.²⁸

Dinamika revolusi di Pasanggrahan Kotanopan kian memuncak saat Belanda melancarkan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Ketika ibu kota Yogyakarta diduduki dan pimpinan nasional ditawan, Tentara Nasional Indonesia di bawah komando Panglima Besar Soedirman. Memproklamasikan berlakunya Pemerintahan Darurat

²⁸ Ahmad Nasution, *op.cit.*, hal.188

Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra dan menggelar Perang Gerilya Semesta .

Peta militer Sumatra bagian tengah, Kotanopan memiliki peran penting karena berada di jalur utama yang menghubungkan Karesidenan Tapanuli dengan wilayah Sumatra Barat, yang menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pasanggrahan Kotanopan kemudian dialih fungsikan menjadi Pos Transit Pertahanan Darurat dan Sub-Markas Gerilya TNI Divisi X/Sumatera bersama Tentara Pelajar dan laskar-laskar rakyat setempat. Ruang-ruang kamar di pasanggrahan difungsikan sebagai tempat penyimpanan pasokan bahan makanan, amunisi, serta pos medis darurat untuk merawat prajurit TNI dan pejuang gerilya yang terluka dalam kontak senjata di koridor perbukitan Mandailing Julu²⁹.

b. Sebagai Tempat Kegiatan Pemerintahan

Pasca pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada akhir Desember 1949 dan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Agustus 1950, tatanan politik Indonesia memasuki era Demokrasi Parlementer. Pada periode ini, fungsi dari Pasanggrahan Kotanopan secara bertahap dikembalikan kepada fungsi administrasi sipil dan pelayanan publik. Pada pemerintahan daerah tahun 1950-an, Kotanopan berkedudukan sebagai ibu kota Kewedanaan Kotanopan di bawah Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Tata kelola Pasanggrahan Kotanopan berada di bawah kewenangan Sekretariat

²⁹ Simatupang , *Laporan dari Banaran: Pengalaman dalam Perang Gerilya* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1980), hal. 310

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Bagian Umum Kantor Camat/Wedana Kotanopan³⁰.

Akhir dekade 1950-an, hubungan antara pemerintah pusat di Jakarta dengan beberapa pemerintah daerah di Sumatra dan Sulawesi mengalami krisis hebat akibat ketidak puasan terhadap perimbangan keuangan dan dominasi politik pusat. Krisis Tiga Daerah dan puncaknya Deklarasi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 15 Februari 1958 di Bukittinggi menyeret kawasan Tapanuli Selatan dan Mandailing ke dalam pusaran konflik bersenjata.

Kotanopan yang berada di koridor perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadikan kota ini sebagai salah satu zona pertempuran dan perlintasan dalam Operasi yang dilancarkan oleh Angkatan Darat (TNI) di bawah komando Mayor Jenderal Ahmad Yani untuk menumpas kekuatan PRRI. Kompleks pesanggrahan kembali diambil alih sementara oleh unit militer TNI-AD (Kodam I/ Bukit Barisan) untuk dijadikan pos komando taktis penertiban keamanan wilayah³¹.

Pencetusan Dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Pada periode ini, dinamika politik nasional sangat didominasi oleh retorika revolusi, sosialisasi Nasionalis, Agama, Komunis, serta pembentukan jaringan Front Nasional hingga ke tingkat kecamatan. Di Kotanopan, Pesanggrahan Kotanopan kembali

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Keppres dan Peraturan Pemerintah Tahun 1961* (Jakarta: Sekneg RI, 1961)

³¹ Lev, Daniel S., *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959* (Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1966), hal. 178

memegang peranan penting dalam panggung politik lokal³². Sebagai tempat penyelenggaraan rapat-rapat umum, serta perayaan agenda-agenda nasional seperti memperingati hari Kemerdekaan, Hari Lahirnya Pancasila. Bangunan ini menjadi arena di mana jargon-jargon politik Pemimpin Besar Revolusi disampaikan kepada masyarakat Mandailing.

Hingga berakhirnya era Orde Lama pada kurun waktu 1965-1966, kondisi fisik Pasanggrahan Kotanopan secara umum masih mempertahankan bentuk asli arsitektur kolonialnya. Struktur utama bangunan yang menggunakan material kayu jati dan meranti pilihan, dinding tembok tebal berplaster kapur, serta atap seng gelombang masih berdiri kokoh.³³

3. Pasanggrahan pada Masa Orde Baru (1966–1998)

a. Sebagai Wisma Pemerintahan Sumatera Utara

Awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Akibatnya, fungsi bangunan kolonial tersebut diubah. Sementara kebutuhan akan administrasi pemerintah semakin meningkat, pembangunan fasilitas baru membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, pemerintah memanfaatkan bangunan yang telah ada untuk membantu pemerintah daerah dan pusat menjalankan tugas mereka, termasuk fungsi Pasanggrahan Kotanopan. Dari tahun 1950-an hingga 1980-an, pengelolaan Pasanggrahan secara resmi diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan menjadi aset

³² Hamidy Harahap, *Greget Tuanku Rao* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2007), hlm. 192.

³³ Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, *Inventarisasi Aset Daerah dan Bangunan Pemerintah* (Padangsidempuan: Setda Tapsel, 1965), hal. 18

wisma negara yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan provinsi tersebut. Untuk tetap sesuai dengan standar modern, lantai interior dan fasilitas sanitasi mengalami renovasi kecil tanpa mengubah elemen arsitektur kolonial seperti dinding kayu dan verandas³⁴.

Wisma merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat menginap sementara. Istilah ini biasanya digunakan untuk tempat tinggal yang sifatnya tidak permanen, baik untuk pegawai, tamu, maupun orang yang sedang melakukan kegiatan tertentu. Pemerintah Indonesia secara bertahap mengubah struktur administrasi negara selama masa Orde Baru. Berbagai fasilitas yang dapat membantu pemerintah harus ada. Wisma pemerintah atau rumah penginapan resmi bagi pejabat negara yang melakukan kunjungan kerja ke daerah tertentu salah satu fasilitas yang banyak digunakan oleh pemerintah daerah. Wisma pemerintah digunakan sebagai tempat pejabat pemerintah pusat dan daerah beristirahat saat melakukan tugas kedinasan. Tujuan dari keberadaan fasilitas ini adalah untuk membuat pekerjaan pemerintah lebih mudah, terutama di daerah yang belum memiliki tempat tinggal yang memadai.

³⁴ *Statistik Daerah Kecamatan Kotanopan 2013* (Mandailing natal : Bidang Integrasi pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2013) hal 04



Gambar 3.4 : Suasana Pasanggrahan Pada tahun 1971
(Sumber : <https://jurnaltabagsel.blogspot.com/>)

Perubahan fungsi Pasanggrahan Kotanopan menjadi wisma pemerintah dapat dipahami sebagai upaya bangunan untuk memenuhi kebutuhan administrasi negara setelah kemerdekaan. Bangunan yang dulunya digunakan untuk mendukung sistem kolonial diubah fungsinya agar tetap dapat digunakan dalam sistem pemerintahan baru. Dalam teori fungsionalisme struktur, proses ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi suatu struktur agar tetap memiliki fungsi dalam sistem sosial yang baru. Perubahan fungsi semacam ini menunjukkan bahwa keberlangsungan suatu bangunan sering kali ditentukan oleh kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan sosial dan politik³⁵.

b. Sebagai Simbol Otoritas Daerah

Bangunan pemerintahan mempunyai dua fungsi yaitu praktis dan simbolis. Pasanggrahan menjadi simbol kehadiran pemerintah Belanda di daerah selama era kolonial. Makna simbolik ini berkembang

³⁵ Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2021. *Tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara* (di akses melalui sumut.antarnwes 27 agustus 2026)

setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan. Bangunan yang dulunya menunjukkan kekuasaan kolonial sekarang dapat berfungsi sebagai representasi otoritas pemerintah Indonesia di tingkat daerah. Perubahan makna simbolik Pasanggrahan Kotanopan menunjukkan bahwa nilai historis bangunan berubah.

Perubahan fungsi simbolis ini menunjukkan bahwa bangunan memiliki nilai fisik dan nilai sosial, politik, dan historis yang berubah seiring berjalannya waktu. Dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat juga memengaruhi perubahan fungsi Pasanggrahan Kotanopan. Kebutuhan akan ruang publik dan fasilitas umum meningkat seiring perkembangan pemerintahan Indonesia dan aktivitas masyarakat. Dalam situasi seperti ini, Pasanggrahan Kotanopan digunakan untuk berbagai tujuan, seperti tempat pertemuan masyarakat, kegiatan administratif lokal, dan fungsi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan komunitas lokal.

Tahun 1950-an hingga 1970-an, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan beberapa renovasi ringan pada bagian interior Pasanggrahan Kotanopan. Renovasi tersebut meliputi penggantian lantai keramik lama yang telah mengalami kerusakan dengan material lantai yang lebih modern untuk meningkatkan kenyamanan sebagai wisma penginapan, serta perbaikan pada bagian pipa sanitasi. Meskipun dilakukan beberapa perbaikan, tata letak ruangan tetap dipertahankan sehingga tidak mengubah bentuk utama bangunan.

Perubahan pada bagian luar bangunan terlihat dengan dibangunnya Tugu Perintis Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1988 di halaman depan Pasanggrahan Kotanopan. Tugu tersebut berbentuk obelisk dan memuat informasi mengenai Proklamasi 1945, Pembukaan UUD 1945, serta nama-nama tokoh atau pahlawan dari Mandailing. Pembangunan tugu tersebut menambah nilai simbolis pada kawasan Pasanggrahan Kotanopan, tetapi tidak mengubah bentuk dan struktur utama bangunan.³⁶



Gambar 3.5 : Tugu Perintis Didepan Pasanggrahan Yang Setiap Sisi Berisi Teks Proklamasi dan Daftar nama pahlawan asal Kotanopan (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

4. Pasanggrahan Pada Era Reformasi (1999–2013)

a. Pasanggrahan sebagai Penginapan Umum

Era Reformasi memberikan pemerintah daerah kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, dan sumber daya. Perubahan tersebut tidak hanya mengubah cara pemerintahan beroperasi, tetapi juga bagaimana aset pemerintah daerah dikelola, termasuk bangunan bersejarah. Kebijakan ini memberikan

³⁶ Rahmat Kurnia Lubis “Kotanopan: Desa Tua, Bertuah dan Bersejarah di Mandailing Natal,” rentak.idSenin, 10 Februari 2025 <https://rentak.id/kotanopan-desa-tua-bertuah-dan-bersejarah-di-mandailing-natal/> (akses 11 mei 2026)

pemerintah daerah peluang untuk memutuskan bagaimana memanfaatkan aset bersejarah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasca penyerahan kedaulatan dan penataan administrasi pemerintahan daerah, kompleks Pasanggrahan Kotanopan diintegrasikan ke dalam skema inventarisasi aset pemerintah daerah, baik pada masa Kabupaten Tapanuli Selatan hingga era pemekaran Kabupaten Mandailing Natal tahun 1999. Tanggung jawab operasional berada di bawah kewenangan Sekretariat Daerah khususnya Bagian Umum/Aset serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lokal. Tanggung jawab operasional dan yuridis berada di bawah kewenangan Sekretariat Daerah khususnya Bagian Umum/Aset serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lokal. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan, pemeliharaan, dan pengaturan pemanfaatan infrastruktur dan fasilitas umum, termasuk bangunan bersejarah seperti Pasanggrahan Kotanopan³⁷.

Noni Priyaeni selaku kepala pengurus Pasanggrahan Kotanopan menjelaskan bahwa, sebagai bangunan tua yang menggunakan material kayu dan memiliki ciri khas arsitektur kolonial, Pasanggrahan Kotanopan pemeliharaan dan perbaikan dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan struktur akibat usia bangunan dan kondisi lingkungan yang lembap. Upaya tersebut meliputi penggantian dan perawatan papan lantai kayu yang lapuk, perbaikan saluran pembuangan air dan fasilitas sanitasi, serta perawatan interior kamar,

³⁷ Awi Ruben dkk, "Implementasi Tanggung Jawab Pemerintahan Terhadap Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Bengkalis" *Collegium Studiosum Journal*, VOL. 7 NO. 1 (2024)

pencahayaannya, dan perabot tanpa mengubah tata ruang asli. Selain itu, atap dan dinding yang dirawat secara rutin, termasuk melalui pengecatan ulang fasad, untuk melindungi struktur kayu dari pelapukan dan pengaruh cuaca. Secara keseluruhan, pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga kondisi fisik, kenyamanan, dan keaslian arsitektur Pesanggrahan Kotanopan³⁸.

Pasanggrahan masih berada dalam pengelolaan pemerintah daerah dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan hingga saat ini. Tetap difungsikan sebagai akomodasi bagi tamu pemerintah atau masyarakat umum. Kegiatan tertentu, digunakan untuk acara resmi, rapat, atau kegiatan sosial-budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pelestarian keberadaan bangunan yang mana pemerintah daerah berupaya mempertahankan eksistensi Pasanggrahan sebagai bagian dari warisan sejarah dan aset daerah. Pemanfaatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya melihat Pasanggrahan dari sisi fungsional, tetapi juga dari sisi pelestarian nilai sejarah dan budaya³⁹.

Bangunan yang memiliki nilai historis tinggi, pelestarian Pesanggrahan Pasanggrahan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan mempertahankan fungsi bangunan sebagai tempat akomodasi dan kegiatan publik, menjaga keaslian arsitektur serta elemen-elemen khasnya, dan melestarikan nilai

³⁸ Noni Priyaeni, kepala pengurus Pasanggrahan Kotanopan, wawancara langsung, 06 april 2026

³⁹ Bappeda Kabupaten Mandailing Natal, *Laporan Evaluasi Pemanfaatan Aset Bangunan Bersejarah Daerah* (Panyabungan: Bappeda Madina, 2011), hal. 24.

sejarahnya sebagai saksi berbagai peristiwa penting, termasuk kunjungan Presiden Soekarno pada tahun 1948. Langkah-langkah ini sejalan dengan prinsip yang menekankan pentingnya menjaga warisan budaya agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Sebelum era reformasi, Pasanggrahan Kotanopan secara historis difungsikan sebagai tempat persinggahan resmi bagi pejabat pemerintah, tamu dinas, dan rombongan resmi yang melakukan perjalanan antar wilayah. Fungsi ini merupakan warisan dari masa kolonial, ketika Pasanggrahan dibangun sebagai bagian dari sistem akomodasi pemerintah untuk mendukung mobilitas administratif dan logistik di wilayah Mandailing. Pada masa itu, Pasanggrahan tidak terbuka untuk umum. Akses terhadap fasilitas ini terbatas pada kalangan tertentu, terutama pejabat pemerintah dan tamu yang memiliki surat tugas atau izin resmi dari pengelola. Fungsi utamanya pada saat itu sebagai tempat istirahat sementara dalam rangka perjalanan dinas, bukan sebagai akomodasi komersial atau pariwisata⁴⁰.

Pasca pemekaran Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 1999 yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, orientasi tata kelola aset daerah mengalami pergeseran paradigma⁴¹. Pada rentang tahun 1999-2013, seiring dengan meningkatnya dinamika mobilitas penduduk, kegiatan perekonomian, dan potensi pariwisata di kawasan Mandailing Julu, pemerintah daerah mulai melonggarkan rigiditas

⁴⁰ Basyral Hamidy Harahap, *Greget Tuanku Rao* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2007), hal. 142

⁴¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Jakarta: Lembaran Negara RI, 1998)

penggunaan Pasanggrahan Kotanopan. Bangunan bersejarah ini memasuki fase transisi penting, di mana pemanfaatannya berkembang dari sekadar tempat persinggahan pejabat kedinasan menjadi fasilitas publik yang lebih inklusif⁴².

Perubahan paling mendasar dalam fungsi Pasanggrahan adalah keterbukaannya terhadap publik. Pasanggrahan Kotanopan tidak lagi khusus untuk agenda pemerintahan, melainkan resmi dibuka sebagai sarana penginapan umum yang dapat diakses oleh masyarakat luas, wisatawan lokal, peneliti, maupun pelaku perjalanan lintas Sumatra. Pelonggaran fungsi ini bertujuan untuk mengoptimalkan daya guna aset daerah agar tidak terbengkalai sekaligus memberikan alternatif sarana akomodasi di Kecamatan Kotanopan.

Samsul Bakhri menjelaskan selaku salah satu staf pengurus pasanggrahan menyatakan bahwa, keterbukaan ini ditandai dengan adanya sistem pembayaran atau tarif yang dikenakan kepada pengguna.

Keterbukaan ini ditandai dengan adanya sistem pembayaran atau tarif yang dikenakan kepada pengguna. Besaran tarif yang ditetapkan berada pada kategori terjangkau dengan mekanisme pembayaran yang dikelola sebagai kontribusi pendukung operasional kebersihan dan pemeliharaan rutin bangunan. Dengan tarif sebesar Rp 200.000 per orang per hari. Penerapan tarif ini menunjukkan bahwa Pasanggrahan telah bertransformasi dari fasilitas eksklusif pemerintah menjadi akomodasi semi komersial yang dikelola secara profesional. Transformasi ini mengubah citra Pasanggrahan Kotanopan di mata masyarakat, dari yang

⁴² Bappeda Kabupaten Mandailing Natal, *Op.cit.*, hal. 29.

semula terkesan formal dan tertutup menjadi sebuah penginapan publik yang ramah, namun tetap mempertahankan aura historis kolonialnya.⁴³

Samsul Bakhri lanjut menjelaskan, bahwa Pasanggrahan Kotanopan memiliki kapasitas yang cukup dengan menyediakan 11 kamar tidur. Pasanggrahan yang letaknya di lembah yang dikelilingi pegunungan membuat udara di Kotanopan relatif sejuk. Sirkulasi udara cukup mengandalkan jendela-jendela kayu besar yang menjadi ciri khas arsitektur kolonial. Kamar mandi dan sanitasi yang cukup untuk menampung kapasitas penginapan. Area teras dan ruang bersama untuk aktivitas sosial. Meskipun tidak dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti hotel modern, Pasanggrahan menawarkan pengalaman akomodasi yang autentik dengan nilai sejarah yang kuat.

Elemen paling signifikan dalam tata ruang interior bangunan ini adalah keberadaan Kamar Nomor 1, yang secara historis dikenal sebagai Kamar Soekarno. Kamar ini merupakan ruang tempat Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, menginap ketika melakukan kunjungan kerja pada Rapat Akbar tanggal 16 Juni 1948 di Kotanopan. Tidak membedakan harga tarif maupun interior dalam kamarnya dengan kamar lainnya. Sementara itu, kondisi fisik kamar-kamar lainnya menunjukkan keberlangsungan perawatan yang aktif. Adanya perawatan berkala seperti pembenahan pada tiga unit kamar yang sedang diperbaiki secara bergantian-menjadi bukti logis bahwa tata kelola operasional

⁴³Samsul Bakhri, Salah satu staf pengurus Pasanggrahan Kotanopan, wawancara langsung, 08 april 2026

penginapan berjalan secara dinamis dan responsif terhadap kenyamanan pengunjung⁴⁴.



Gambar 3.6 : Halaman Depan Pasanggrahan
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)



Gambar 3.7 : Tampak Luar Kamar dengan
Pintu Khas Arsitektur Kolonial Belanda
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)



Gambar 3.8 : Ruang Tamu tempat menerima
Yang Ingin Menginap di Pasanggrahan
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)



Gambar 3.9 : Keadaan Dalam Kamar
Penginap Pasanggrahan
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Salah satu bukti konkret bahwa Pasanggrahan mulai dibuka sebagai untuk penginapan umum pada tahun 2013. Pada September 2013, dimulai dengan kedatangan rombongan peserta JSSP yang dari berbagai daerah, tim medis, serta media massa nasional resmi singgah dan memanfaatkan fasilitas Pasanggrahan Kotanopan sebagai tempat bermalam. Kegiatan yang melintasi ribuan kilometer di Pulau Sumatra yang merupakan ajang olahraga berskala nasional tersebut menempatkan Kotanopan sebagai salah satu titik pelintasan yang

⁴⁴ *Ibid*

krusial. Peserta JSSP menunjukkan bahwa fungsi fasilitas pasanggrahan masih aktif sebagai tempat penginapan yang dapat diakses oleh publik, bukan hanya tamu dinas. Pasanggrahan juga mampu menampung rombongan besar, sehingga menunjukkan bahwa bangunan ini layak digunakan. Selain itu, nilai sejarahnya tetap dipertahankan melalui penyewaan Kamar Soekarno kepada masyarakat umum, termasuk peserta JSSP, yang membuktikan bahwa nilai historis bangunan tetap diperhatikan dalam pengelolaan modern⁴⁵.

Zulkarnain Lubis yang merupakan Lurah di Kelurahan Kotanopan di tahun 2013 menyampaikan perubahan pasanggrahan dipahami sebagai perluasan fungsi, dimana fungsi lama tidak hilang sepenuhnya, tetapi diperluas untuk mencakup pemanfaatan yang lebih inklusif. Dari masa kolonial hingga awal kemerdekaan, Pasanggrahan berfungsi sebagai tempat persinggahan bagi pejabat pemerintah dan tamu dinas. Namun, pada periode 1999–2013, fungsi Pasanggrahan mengalami perluasan karena mulai dibuka untuk masyarakat umum dan wisatawan. Perluasan ini didorong oleh tuntutan efisiensi anggaran, yaitu kebutuhan pemerintah daerah untuk memperoleh sumber pendapatan tambahan dari aset yang dimiliki melalui penerapan tarif komersial⁴⁶.

Zulkarnain Lubis juga menjelaskan bahwa nilai sejarah dan arsitektur Pasanggrahan yang menarik turut mendukung

⁴⁵ Tim Tim Jelajah Sepeda Kompas, *Laporan Perjalanan Jelajah Sepeda Sabang-Padang 2013* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013)

⁴⁶Zulkarnainin Lubis, kepala Kelurahan Kotanopan pada tahun 2013, wawancara langsung, 12 april 2026

pengembangannya sebagai daya tarik wisata akomodasi yang unik. Di sisi lain, keterbatasan jumlah hotel atau penginapan komersial di wilayah Kotanopan menjadikan Pasanggrahan sebagai alternatif akomodasi yang penting bagi wisatawan dan pelancong. Hingga tahun 2013, Pasanggrahan masih menjalankan dualisme fungsi yaitu perubahan fungsi Pasanggrahan tidak bersifat linier atau menggantikan fungsi lama, melainkan bersifat kumulatif. Fungsi lama sebagai tempat persinggahan resmi tetap dipertahankan, sementara fungsi baru sebagai penginapan umum ditambahkan untuk memperluas manfaat sosial dan ekonomi dari aset daerah.

b. Pasanggrahan sebagai Warisan Sejarah dan Identitas Lokal

Pasanggrahan Kotanopan merupakan salah satu bangunan peninggalan kolonial yang memiliki nilai historis bagi masyarakat Kotanopan dan Mandailing Natal. Dibangun pada tahun 1930, keberadaan Pasanggrahan tidak hanya berkaitan dengan fungsi akomodasi bagi pejabat kolonial, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah Kotanopan hingga masa kemerdekaan. Nilai historis bangunan ini semakin kuat karena berkaitan dengan berbagai peristiwa perjuangan dan perkembangan masyarakat di wilayah Mandailing⁴⁷.

Salah satu peristiwa yang memperkuat nilai sejarah Pasanggrahan Kotanopan adalah kunjungan Presiden Soekarno pada 16 Juni 1948. Dalam kunjungan tersebut, Soekarno bermalam di Pasanggrahan dan menyampaikan pidato dalam sebuah rapat akbar yang

⁴⁷Yoseph Pencawan, "Merestorasi Jejak Bung Karno di Sumatra Utara" <https://mediaindonesia.com/nusantara/467487/merestorasi-jejak-bung-karno-di-sumatra-utara> (di akses Kamis 13 Agustus 2016)

dihadiri masyarakat dan tokoh-tokoh perjuangan setempat. Peristiwa yang menjadikan Pasanggrahan tidak hanya sebagai peninggalan masa kolonial, tetapi juga sebagai salah satu tempat yang berkaitan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan di Kotanopan

Nilai sejarah Pasanggrahan semakin diperkuat dengan keberadaan Tugu Perintis Kemerdekaan yang dibangun di kawasan Pasanggrahan. Tugu tersebut menjadi bagian dari penanda sejarah perjuangan masyarakat Kotanopan dan memperkuat hubungan antara Pasanggrahan dengan memori perjuangan kemerdekaan di daerah tersebut. Keberadaan bangunan dan tugu dalam satu kawasan menjadikan Pasanggrahan tidak hanya memiliki nilai arsitektural, tetapi juga nilai sejarah dan simbolis⁴⁸.

Masyarakat sebagai tetangga dan tokoh agaman di kelurahan Kotanopan dan Mandailing Natal, opung Amri Mukhlis Daulay menyatakan Pasanggrahan kemudian berkembang menjadi bagian dari identitas sejarah lokal. Bangunan ini yang menjadi penghubung antara masyarakat masa kini dengan berbagai peristiwa sejarah yang pernah berlangsung di wilayah kotanopan. Oleh karena itu, pelestarian Pasanggrahan penting dilakukan tidak hanya untuk mempertahankan bangunan sebagai peninggalan fisik, tetapi juga untuk menjaga nilai sejarah dan memori kolektif masyarakat terhadap perjuangan serta perkembangan sejarah Kotanopan.⁴⁹

⁴⁸ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal, *Laporan Inventarisasi Situs Sejarah dan Cagar Budaya Mandailing Natal* (Panyabungan: Disbudpar Madina, 2015), hal. 38.

⁴⁹ wawancara dengan Opung Amri Mukhlis Daulay, Tokoh Agama Kelurahan Kotanopan , Di Kotanopan, 14 april 2026

C. Faktor yang Mempengaruhi

Perubahan fungsi Pasanggrahan Kotanopan sejak 1930 hingga 2013 dipengaruhi oleh kondisi bangunan serta perubahan sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat. Perubahan tersebut terlihat dari pemanfaatannya sebagai tempat persinggahan dan fasilitas pemerintahan pada masa kolonial, kemudian mengalami penyesuaian fungsi pada masa setelah kemerdekaan hingga akhirnya digunakan sebagai penginapan bagi masyarakat umum

1. Faktor Internal

Faktor internal berkaitan dengan kondisi fisik, tata ruang, dan lokasi Pasanggrahan Kotanopan. Kondisi bangunan yang bertahan serta tata ruang yang dapat disesuaikan memungkinkan Pasanggrahan digunakan untuk berbagai kebutuhan pada periode yang berbeda. Keberadaan ruang kamar, ruang tamu, dan beranda mendukung pemanfaatan bangunan sebagai tempat persinggahan umum maupun kegiatan pemerintahan⁵⁰.

Selain itu, lokasi Pasanggrahan yang berada di kawasan Kotanopan turut mendukung keberlanjutan pemanfaatannya. Letaknya yang mudah dijangkau menjadikan bangunan tersebut tetap memiliki fungsi bagi pejabat pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, kondisi fisik bangunan, tata ruang, dan lokasi menjadi faktor internal yang mendukung keberlangsungan serta perubahan fungsi Pasanggrahan dari waktu ke waktu⁵¹.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berkaitan dengan perubahan politik, pemerintahan, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pergantian kekuasaan dari masa

⁵⁰ Handinoto, *lok. cit.*, 82

⁵¹ Nuraini, *Op.cit.*, hal 14

kolonial, pendudukan Jepang, masa kemerdekaan, hingga masa Orde Baru dan otonomi daerah menyebabkan pemanfaatan Pasanggrahan disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap periode⁵².

Perubahan kebutuhan masyarakat juga turut memengaruhi fungsi Pasanggrahan. Perkembangan mobilitas masyarakat dan kegiatan pemerintahan serta terbatasnya fasilitas penginapan di wilayah Kotanopan mendorong pemanfaatan bangunan sebagai tempat menginap bagi masyarakat umum. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa fungsi Pasanggrahan tidak bersifat tetap, tetapi menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan pemerintah⁵³.

Pada masa otonomi daerah, perubahan dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan aset daerah turut memengaruhi pemanfaatan Pasanggrahan. Bangunan yang sebelumnya lebih banyak digunakan untuk kepentingan pemerintahan kemudian dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas penginapan dan kegiatan pariwisata. Perubahan kebijakan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat menjadi faktor eksternal yang mendorong perubahan fungsi Pasanggrahan Kotanopan pada tahun 2013⁵⁴.

3. Perubahan Makna Bangunan

Perubahan fungsi Pasanggrahan Kotanopan tidak hanya menunjukkan perubahan dalam pemanfaatan bangunan, tetapi juga perubahan maknanya. Pada masa kolonial, Pasanggrahan berkaitan dengan keberadaan pemerintahan kolonial dan digunakan sebagai tempat persinggahan pejabat. Setelah Indonesia merdeka, makna tersebut mengalami perubahan seiring dengan berbagai

⁵² Nugroho Notosusanto, *lok. cit.* hal.65

⁵³ Statistik Daerah Kecamatan Kotanopan 2013, *lok. cit.* hal. 4

⁵⁴ Askolani Nasution, *lok. cit.* hal 5-6

peristiwa sejarah yang berlangsung di kawasan tersebut. Kunjungan Presiden Soekarno pada 16 Juni 1948 menjadi salah satu peristiwa yang memperkuat nilai sejarah Pasanggrahan Kotanopan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi bagian dari ingatan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Nilai sejarah tersebut semakin diperkuat dengan keberadaan Tugu Perintis Kemerdekaan di kawasan Pasanggrahan⁵⁵.

Hingga tahun 2013, Pasanggrahan tidak lagi hanya dipandang sebagai bangunan peninggalan kolonial, tetapi juga sebagai bagian dari warisan sejarah dan identitas masyarakat Kotanopan. Meskipun fungsinya mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan setiap periode, nilai sejarah bangunan tetap dipertahankan. Dengan demikian, perubahan fungsi Pasanggrahan menunjukkan adanya proses penyesuaian antara kebutuhan masyarakat pada masa kini dengan upaya mempertahankan nilai sejarah bangunan⁵⁶.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

⁵⁵ Yulia Nurliani Lukito dan Riski, *lok.cit.*, hal 5

⁵⁶ Khoirun Nisa dkk, *op.cit.* hal. 29

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sejarah dan Fungsi Pasanggrahan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 1930–2013, dapat disimpulkan bahwa Pasanggrahan Kotanopan merupakan salah satu bangunan peninggalan kolonial yang memiliki keterkaitan dengan perkembangan administrasi pemerintahan, mobilitas pejabat, serta perubahan kehidupan sosial dan politik masyarakat Kotanopan. Keberadaan bangunan ini tidak terlepas dari kondisi Kotanopan sebagai wilayah pedalaman yang memiliki posisi penting dalam jalur pergerakan pemerintahan dan ekonomi. Kondisi geografis dan kebutuhan mobilitas pemerintahan kolonial mendorong pembangunan fasilitas yang dapat menunjang perjalanan pejabat ke wilayah pedalaman. Atas dasar kebutuhan tersebut, Pasanggrahan Kotanopan dibangun pada tahun 1930 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada awal berdirinya, bangunan ini berfungsi sebagai tempat persinggahan dan peristirahatan pejabat pemerintah dalam perjalanan dinas sekaligus sebagai fasilitas pendukung kegiatan administrasi pemerintahan kolonial.

Fungsi Pasanggrahan Kotanopan mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan kondisi politik dan pemerintahan pada setiap periode. Pada masa kolonial Hindia Belanda tahun 1930–1942, Pasanggrahan berfungsi sebagai tempat persinggahan pejabat dan fasilitas pendukung administrasi pemerintahan. Memasuki masa pendudukan Jepang tahun 1942–1945, fungsi bangunan mengalami penyesuaian untuk memenuhi kepentingan administrasi dan pemerintahan militer Jepang. Setelah Indonesia merdeka, pada masa Revolusi Kemerdekaan tahun 1945–1949,

Pasanggrahan digunakan sebagai tempat pertemuan dan kegiatan yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan.

Salah satu peristiwa penting yang berkaitan dengan bangunan tersebut adalah kunjungan Presiden Soekarno pada 16 Juni 1948. Pada masa Orde Lama, Pasanggrahan digunakan dalam kegiatan politik dan pertemuan masyarakat. Selanjutnya, pada masa Orde Baru tahun 1966–1998, bangunan ini dimanfaatkan sebagai wisma pemerintah yang dikelola dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pada periode ini juga dilakukan beberapa renovasi ringan untuk menunjang kenyamanan pengguna tanpa mengubah bentuk utama dan karakter arsitektur kolonialnya. Memasuki masa Reformasi dan otonomi daerah tahun 1999–2013, fungsi Pasanggrahan mengalami perluasan dengan dimanfaatkannya bangunan sebagai fasilitas penginapan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan wisatawan.

Perubahan fungsi Pasanggrahan Kotanopan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi fisik bangunan, tata ruang, serta lokasi yang mendukung keberlanjutan pemanfaatannya. Kondisi bangunan yang masih dapat dipertahankan dan tata ruang yang memungkinkan digunakan untuk berbagai kebutuhan membuat Pasanggrahan tetap dapat dimanfaatkan meskipun terjadi perubahan zaman. Sementara itu, faktor eksternal meliputi perubahan politik dan sistem pemerintahan, pergantian kekuasaan, perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta kebutuhan terhadap fasilitas penginapan. Pada masa otonomi daerah, perubahan kebijakan mengenai pengelolaan aset daerah turut mendorong perluasan pemanfaatan Pasanggrahan sebagai fasilitas penginapan dan kegiatan pariwisata.

Perubahan fungsi Pasanggrahan Kotanopan selama tahun 1930–2013 tidak berlangsung dengan menghilangkan seluruh fungsi sebelumnya, tetapi lebih bersifat berkembang dan menyesuaikan kebutuhan pada setiap periode. Bangunan yang pada awalnya menjadi bagian dari fasilitas pemerintahan kolonial kemudian digunakan untuk kepentingan pemerintahan pada masa Jepang dan setelah kemerdekaan, menjadi ruang kegiatan politik dan pertemuan masyarakat, kemudian berfungsi sebagai wisma pemerintah, hingga berkembang sebagai penginapan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Perubahan tersebut menunjukkan kemampuan Pasanggrahan untuk beradaptasi terhadap perubahan politik, pemerintahan, dan kebutuhan masyarakat.

Pasanggrahan Kotanopan juga mengalami perubahan makna. Pada masa kolonial, bangunan ini berkaitan dengan keberadaan dan kekuasaan pemerintahan kolonial. Setelah Indonesia merdeka, nilai sejarahnya semakin kuat karena berkaitan dengan berbagai peristiwa perjuangan kemerdekaan, khususnya kunjungan Presiden Soekarno pada 16 Juni 1948. Keberadaan Tugu Perintis Kemerdekaan di kawasan Pasanggrahan turut memperkuat nilai historis tersebut. Hingga tahun 2013, Pasanggrahan tidak hanya dipandang sebagai peninggalan kolonial, tetapi juga sebagai bagian dari warisan sejarah dan identitas lokal masyarakat Kotanopan. Dengan demikian, keberlanjutan Pasanggrahan menunjukkan bahwa perubahan pemanfaatan bangunan dapat berjalan berdampingan dengan upaya mempertahankan nilai sejarahnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sejarah dan fungsi Pasanggrahan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal 1930–2013, penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu pasanggrahan kotanopan kedepannya.

Pertama, Pemerintah dan instansi yang membidangi kebudayaan dan pariwisata provinsi Sumatera utara, diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap keberadaan Pasanggrahan Kotanopan sebagai salah satu bangunan bersejarah. Meningkatkan pemanfaatan Pasanggrahan Kotanopan sebagai sumber sejarah lokal dan objek wisata sejarah. Dapat dilakukan melalui penyediaan informasi sejarah yang memadai mengenai latar belakang pembangunan, perubahan fungsi, serta peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan Pasanggrahan, sehingga masyarakat dan pengunjung dapat memahami nilai sejarah bangunan tersebut.

Kedua, Pengelola Pasanggrahan Kotanopan, diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara fungsi bangunan sebagai fasilitas penginapan dengan fungsi pelestariannya sebagai bangunan bersejarah. Pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat dan wisatawan hendaknya tetap memperhatikan kondisi fisik bangunan. Memperhatikan keaslian bentuk, struktur, dan karakter arsitektur bangunan agar nilai historisnya tidak hilang akibat perubahan atau renovasi bangunan.

Ketiga Masyarakat Kotanopan, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan Pasanggrahan sebagai bagian dari sejarah dan identitas lokal. Masyarakat diharapkan turut menjaga kebersihan, keutuhan, dan keberadaan bangunan serta ikut mempertahankan pengetahuan mengenai sejarah Pasanggrahan agar nilai sejarahnya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Keempat generasi muda dan lembaga pendidikan, Pasanggrahan Kotanopan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembelajaran sejarah lokal. Pengenalan terhadap sejarah bangunan bersejarah di lingkungan sekitar diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran sejarah serta rasa tanggung jawab terhadap pelestarian warisan sejarah daerah.

Kelima kepada peneliti selanjutnya, penelitian mengenai Pasanggrahan Kotanopan masih dapat dikembangkan lebih, khususnya melalui penelusuran arsip kolonial, dokumen pemerintahan, foto-foto sezaman, serta sumber lisan yang lebih luas. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji aspek arsitektur, pengelolaan bangunan, sejarah kepemilikan aset, maupun persepsi masyarakat terhadap Pasanggrahan Kotanopan sehingga kajian mengenai bangunan bersejarah tersebut menjadi lebih komprehensi



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N. d. (2020). Dampak Perang Batak pada Tahun 1878 - 1907 Terhadap Penyebaran Agama Kristen di Sumatera Utara.
- Alauwiyah, T. W. (2025). Transformasi Tata Kelola Marga Di Sumatera Selatan: Analisis Komparatif Era Kolonial Belanda Dan Republik Indonesia, 1825-1983. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 514-523.
- Alawiyah, T. W. (2025). Transformasi Tata Kelola Marga Di Sumatera Selatan : Analisis Komparatif Era Kolonial Belanda Dan Republik Indonesia 1825-1983. *Responsif : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidanh Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publi*, , 514-523.
- Anwar, S. (n.d.). Deli dan Sumatera Timur dalam Pusaran Politik Kawasan Kolonial Belanda. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*.
- Batavia, T. I. (n.d.). Topografische Kaart van Sumatra 1930-1938. Blad Kotanopan Mandheling: Residentie Tapanoei .
- Castles, L. (2001). Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera: Tapanuli 1915-1940. Kepustakaan Populer Gramedia.
- die op de helling van den werkenden vulkaan Sorik Merapi ontspringen*,. (2026, Mei). Retrieved from westelijk van Kotanopan, Landbouw; tijdschrift der Vereeniging van Landbouwconsulenten in Nede” internationale archieven: <https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/results?query=kotanopan+pasanggrahan+&page=2&coll>
- dkk, A. A. (2020). Dari Pasanggrahan Hingga Gramedia Hotel: Akomodasi Penginapan UntukTuris Pada Masa Hindia-Belanda Di Priangan (1869-1942). *pacanjala*, 158-175.
- dkk, A. R. (2024). Implementasi Tanggung Jawab Pemerintahan Terhadap Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Bengkalis. *Collegium Studiosum Journal*.
- dkk, F. H. (2021). Karakteristik Arsitektural Bangunan Indis Pada Perumahan Pegawai PJKA Pengok Blok A & B di Yogyakarta. *SADE*, 28-41.

- dkk, K. H. (2018). erintis kemerdekaan di Kotanopan – Mandailing. *Medan, Hikmah Sumut, PIDM dan Perdana Publishing*.
- dkk, P. (n.d.). Comprehensive assessment and material analysis of a heritage structure: proposing an effective restoration and retrofitting strategy. *ournal of Asian Architecture and Building Engineering* .
- Gottschalk, L. (1986). Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Handinoto. (2010). Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia. Yogyakarta: Ombak.
- Harahap, B. H. (2007). Greget Tuanku Rao. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Hasibuan, I. (2025, oktober). *Perayaan Kemerdekaan di Mandailing Nata*. Retrieved from <https://malintangpos.co.id/perayaan-kemerdekaan-di-mandailing-natal-1/>
- Idfitriyani. (2014). Adaptasi Fungsi Bangunan Kolonial sebagai Upaya Pelestarian Warisan Arsitektur di Tapanuli Selatan. *Jurnal Permukiman dan Warisan Budaya*, 46.
- Ja'far. (2022). Menemukan Warisan Mandailing, Ulama: Pendidikan, Kaum Intelektual, dan Politik di Amerika Utara Sumatra pada Awal Abad ke-20. *Studi Islam yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Mataram*, 296-336.
- Junaidi, B. A. (2018). The Dutch Colonial Economic Policy: Coffee Exploitation in Tapanuli Residency, 1849–1928. *Kemanusiaan* , 49-71.
- Kahneman, T. &. (1974). Penilaian dalam Ketidak pastian. *Heuristik dan Bias. Sains*, 1124-1131.
- Kebudayaan, D. P. (1978). Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah Sumatera Utara. Medan: Depdikbud Sumatera Utara.
- kebudayaan, L. k. (2020). Pesanggrahan Dalem Ngeksigondo Kaliurang: Sejarah, Arsitektur, dan Fungsinya Dulu hingga Kini. Yogyakarta: Balai Pelestarian Cagar Budaya.
- Khusnul Khofifah Harahap, d. (2020). Jas Merah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah) . Yogyakarta :: Samudra Biru (Anggota IKAPI).

- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kompas, T. T. (2013). *Laporan Perjalanan Jelajah Sepeda Sabang-Padang 2013*. Buku Kompas.
- Kota Nopan Jadi Pusat Pelaksanaan Hari Pahlawan di Mandailing Natal,. (2026, Februari rabu). Retrieved from <https://madinapos.com/2021/11/10/kota-nopan-jadi-pusat-pelaksanaan-hari-pahlawan-di-mandailing-natal/>
- Kotanopan, a. s. (2026, April). (S. Bakhri, Interviewer)
- Kotanopan, K. P. (2026, April). (i. N. Priyaeni, Interviewer)
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya,.
- Kurniawan, A. (2021). Konsep Pelestarian Bangunan Kolonial di Jalur Belanda Menuju Singaraja, Kota Warisan Budaya” Prosiding Konferensi Internasional Warmadewa ke-1 tentang Sains. *Teknologi dan Kemanusiaan*.
- Landbouw, D. v. (n.d.). *Nijverheid en Handel. (1935) Volkstelling 1930. Deel IV: Inheemse Bevolking van Sumatra. Batavia: Landsdrukkerij.*
- Lubis, A.-R. (2005). Mandailing Islam across Borders. *Taiwan Journal of Southeast Asian Studies*,, 55-98.
- M.L Jhingan, E. P. (1996). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta:: PT Raja Grafindo.
- Mansyur, I. M. (2020). *Pesanggrahan Mandiingin : Kajian Sejarah dan Arsitektur Bangunan Hindia Belanda di Bukit Besar Mandiingin*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran (Anggota IKAPI).
- Muhammad. (2007). *Sejarah Seni Rupa Sumatera Utara Kajian Kehidupan Seni Rupa Di Medan Tahun 1945-2005*. banda aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.
- Nasution, A. (1978). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 7: Periode Renville*. Bandung: Angkasa .
- Natal, B. K. (2011). *Laporan Evaluasi Pemanfaatan Aset Bangunan Bersejarah Daerah*. Panyabungan: Bappeda Madina.
- Notosusanto, N. (1984). *Pendudukan Jepang Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Politik Di Indonesia Tahun 1942-1945*. Jakarta: Gramedia.

- Nuraini, C. (2010). Variasi Pola Desa-Desa Tradisional Di Kotanopan, Mandailing Natal. *Nalars* , 11-26.
- Nurhidayah, I. d. (2026). dentifikasi Arsitektur Indische Empire Style pada Bangunan Landhuizen Kelengan di Kota Semarang. *Sarga: Journal of Architecture*, 4-5.
- Officiele Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch-Indië, Pasanggrahan in Nederlandsch-Indië. (1937). Batavia: Landsdrukkeri.
- Online., I. H. (2025, oktober 13). *Perayaan Kemerdekaan di Mandailing Natal*. Retrieved from <https://malintangpos.co.id/perayaan-kemerdekaan-di-mandailing-natal-1/>
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2021*. (2026, Agustus).
- Rabani, A. A. (2022). Arsitektur Indis dan Perubahan Sejarah Kota Magelang 1906-1942. *SASDAYA Gajah Mada Journal of Humanities*, 35-48.
- Renie, G. (1997). Metode Sejarah. Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
- Ricklefs, M. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi.
- Ritonga, N. d. (2025). The Influence of Dutch Colonial Architecture: A Case Study of Dutch The Influence of Dutch Colonial Architecture: A Case Study of Dutch. *Journal Of Samudra Social Studies Research(jsss)*, 59-65.
- Sandy, D. K. (2025). Payakumbuh: Kajian Arkeologi Perkotaan diKeresidenanPantai Barat Sumatra. *PURBAWIDYA*, 129-150.
- Santoso, M. N. (2023). Transition In Building Function Of The Former Official Residences For Resident And Resident Assistants FromThe Dutch Colonila Heritage Of The 19-20 Thcentury In Madiun Raya. *Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 82-90.
- Sejarah, D. (2007). Kodim II Bukit Barisan, Sejarah perang kemerdekaan di Sumatera, 1945-1950 (Indonesia Angkatan Darat. Komando Daerah Militer-II Bukit Barisan. Dinas Sejarah,.
- Selatan, B. U. (1965). Inventarisasi Aset Daerah dan Bangunan Pemerintah. Padangsidempuan: Setda Tapsel.

- setiawan, n. (n.d.). Ruang Tanpa Batas: Sejarah Dan Politik Memori Pada Public Space Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949. *Magister Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada*, 186.
- Simatupang. (1980). Laporan dari Banaran: Pengalaman dalam Perang Gerilya . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, S. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali.
- Soekmono. (2014). Dimensi Teknik Arsitektu. *Institut Teknologi Bandung* .
- Touwen, J. (1999). Moving towards a National Economy in Late Colonial Indonesia. *Itinerario* .
- Transformasi Kakawin Bharata Yuddha ke Dalam Pertunjukan Wayang Kulit Parwa Lakon Jayadrata Antaka Dalang I Made Sidi. (2022). *jurnal IPGB Danaswara*.
- Yulia Nurliani Lukito dan Amalia Nurul Rizky. (2017). Menggali masa lalu kota melalui pelestarian bangunan bersejarah. *Menggali masa lalu kota melalui pelestarian bangunan bersejarah*, 1-8.
- vervoer naar Kota-Nopan 2 da'en*. (n.d.). Retrieved from Te Kota-Nopan tot aflevering der koffij. ... i ua° Voor de terugreis van, Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 24, 1862 (1e deel): <https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/results?query=kotanopan&page=1&maxperpage=3&coll=ds>
- vervoer naar Kota-Nopan 2 da'en*. (n.d.). Retrieved from Te Kota-Nopan tot aflevering der koffij. ... i ua° Voor de terugreis van, Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 24, 1862: <https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/results?query=kotanopan&page=1&maxperpage=3&coll=ds>
- Wibowo, A. S. (2018). Study of building typology of school constructed during the Dutch Colonial Period in Indonesia. Case study of Hoogere Burgerschool (HBS) in Bandung. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 1-5.
- Willer. (1861). Het landschap Mandelhing voor zoo ver het onder rechtstreeksch beheer van het Gouvernement staat. Batavia: Lange & Co.

Yulia Nurliani dkk. (n.d.). Menelusuri kembali warisan benteng di Ternate, Maluku

Utara: nostalgia, pariwisata, dan keterlibatan masyarakat. *Warisan yang Dibangun*.

Yulianto Sumalyo, A. K. (2017). *Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia*.

Yogyakarta: Gadhja Mada Ekspres.

Yusni Khairul Amri, k. l. (2018). *kearifan lokal Adat Istiadat Tapanuli Selatan* . Jawa

Timur : Kun Fayakun Anggota: Kun Fayakun Anggota IKAPI.



UIN IMAM BONJOL
PADANG